

Percakapan dengan

Jamhari Makruf



**Jamhari Makruf**, Pembantu Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mantan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.

---

Demitologisasi atas konservatisme atau dogmatisme agama, terutama wacana publik tentang syariah, adalah langkah yang harus ditempuh dengan merekonstruksi (sejarah) Islam untuk mengantarkannya pada konteks kekinian, sehingga sesuai dengan karakter budaya masyarakat kita. Agama dikembalikan pada orbitnya: penyelamat dan penerang hati umat. Sebab Islam adalah pembebasan. Sebaliknya, ketika agama berbaur dengan kekuasaan (politik), ia mengidentikkan diri dengan otoritarianisme, kekerasan, dan perilaku korup. Maka, demitologisasi di sini lebih sebagai semangat pembebasan yang menjiwai liberalisme dan sekularisme dalam bingkai keindonesiaan. Salah satu caranya, membekali umat Islam, minimal kalangan akademis, dengan perspektif sosio-historis.

*Sekularisme kerap dipandang sebagai pemisahan tegas antara wilayah privat dan publik. Akibatnya, ia pun dinilai meminggirkan peran agama di ranah publik, bahkan dianggap sebagai anti-agama. Menurut Anda, sebenarnya apa makna sekularisme?*

Sekularisme, sebagaimana makna liberalisme dan pluralisme, tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosiologis masyarakat dan sejarah Eropa. Pada awal kemunculan sekularisme, Eropa masih begitu kental dengan unsur-unsur keagamaan. Secara kebetulan, dalam sejarah Eropa ketika itu, gereja sering bertindak menindas. Dari situlah kemudian timbul kesadaran dari beberapa kelompok untuk menentangnya. Dengan konteks seperti itu, bagi masyarakat Eropa, sekularisme merupakan pembebasan dari ketertindasan otoritarianisme agama yang terwujud dalam bentuk kekuasaan. Semangat pembebasan itulah yang tumbuh di Barat dan berkembang sampai sekarang.

Sementara, karena pandangan umat Islam tentang kekuasaan dan agama berbeda dengan Barat, sehingga dunia Islam juga memiliki sejarah sekularisme yang berbeda. Berbeda dengan Barat, dalam hal tertentu, umat Islam justru mengidolakan kekuasaan agama. Misalnya, kini muncul gerakan yang ingin kembali ke bentuk pemerintahan *khilâfah*. Dalam pandangan mereka yang mengusungnya, kekuasaan agama dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Hal itulah yang kemudian membuat perbedaan penafsiran terhadap sekularisme, yakni perbedaan faktor sejarah. Itu juga yang melahirkan berbagai sudut pandang tentang sekularisme di dalam Islam.

Bagi saya, sekularisme dapat dimaknai positif dalam dua hal. *Pertama*, dan ini yang lebih penting, adalah bagaimana umat Islam memaknai sekularisme dari semangat yang melatarbelakanginya, bukan isme-nya. Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri. Selama ini, agama – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

*Kedua*, saya memandang sekularisme positif dalam arti melihat masalah secara kontemporer dan kontekstual. “Jangan sampai umat Islam hanya berpikir kembali pada nostalgia dan romantisme masa lampau yang tidak pas diterapkan untuk saat ini.” Bagi saya, sekularisme juga bermakna menempatkan Islam pada konteks kekinian.

Sekularisme biasanya dibedakan dengan sekularisasi. Cak Nur, misalnya, sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut, untuk kemudian lebih mengedepankan penggunaan istilah sekularisasi. Anda sendiri bagaimana?

Menurut saya sekularisme dipandang negatif dan resistensinya cenderung tinggi karena, dari sejarahnya, ia dimunculkan oleh semangat melawan (*against*) agama. Dalam sejarah Amerika, misalnya, kita tahu bahwa eksodusnya orang-orang Eropa ke sana tak lain disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh rezim kekuasaan Katolik. Untuk menghindari terulangnya kekuasaan gereja, mereka yang eksodus ini lantas mengentalkan protestanisme di Amerika dan merumuskan klausul *separation between religion and nation*, pemisahan agama dari negara. Itu terjadi karena mereka memang punya pengalaman buruk dikejar-kejar penguasa Katolik, sehingga harus lari dari negaranya. Konteks pada saat itu memang agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan politik.

---

Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri.

---

*Betapa kuatnya pandangan umat Islam terhadap konsep kesatuan agama dan negara, bagaimana menempatkan demitologisasi dalam konteks tersebut?*

Suatu mitos lahir atau muncul pada sebuah masyarakat yang seringkali dilatari kepentingan untuk melestarikan sebuah nilai-nilai tertentu. Karena itu, suatu mitos jelas sangat dipengaruhi oleh konteks pada masanya. Salah satu contohnya adalah di masyarakat tradisional suku Aborigin di Australia.

Mengapa kanguru “haram” dimakan, malah oleh mereka dijadikan Tuhan sebagai simbol mitos? Karena orang Aborigin ingin melestarikan kanguru agar tidak disantap dan dibunuh oleh manusia. Cara seperti inilah, mensakralkan kanguru, yang memang harus ditempuh untuk konservasi alam pada saat itu.

Seiring perubahan dan perkembangan masyarakat, mitos pun kemudian seharusnya berubah, karena lingkungan yang berputar juga mengalami perubahan. Saya selalu mengasih ilustrasi begini: dulu, sebelum ada pesawat terbang, orang sering membuat lelucon, “Suatu saat nanti kita mandi di Singapura, kemudian makan pagi di Filipina, makan malam di Australia dan makan pagi lagi di Jepang”. Pada zamannya, hal seperti itu dianggap mitos, orang hampir tidak percaya bisa melakukannya. Sekarang, itu sangat mungkin dilakukan. Karena ternyata terbang ke Singapura hanya butuh waktu satu jam setengah, ke Filipina lima jam, ke Jepang enam jam, sehingga makan berpindah seperti itu bisa terjadi. Ringkasnya, yang dulu tidak mungkin, kini bisa jadi sangat mungkin.

Mitos-mitos itu diciptakan untuk kepentingan melestarikan ideologi, nilai, atau kepentingan masyarakat tertentu. Karena itu, dengan terus bergulirnya waktu, mitos-mitos yang dulu pernah ada harus didemitologisasi, direkonstruksi sesuai dengan konteks masyarakat sekarang. Saya kasih contoh yang paling ekstrem, misalnya, klaim bahwa seorang kiai kalau hari Jumat bisa terbang ke Mekah, kemudian salat Jumat dan seterusnya di sana. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kita bisa bertanya, “bukankah ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi? Jadi kalau kiai terbang ke Arab Saudi untuk salat Jumat pada waktu yang sama dengan salat Jumat kita, itu mustahil, karena pada waktu yang sama, di sana masih Subuh. Perbedaan waktunya sekitar 6 jam.”

Contoh di atas namanya mendemitologisasi apa yang dulu pernah menjadi mitos. Termasuk juga, misalnya, mitos-mitos kekuasaan Islam: *khilāfah*. Di mana dengan khilāfah, Islam dulu bisa menyatukan beberapa kebudayaan menjadi kekuatan besar. Sampai sekarang hal itu masih menjadi mitos yang sangat luar biasa. Sehingga masih ada anggapan bahwa kalau umat Islam mau berkembang maka harus kembali ke mitos itu. Menurut saya, sekarang kita harus melihat mitos itu dalam konteks yang riil dari masyarakat sekitar. Konteks yang ada sekarang sama sekali berbeda, maka, menurut saya, sangat perlu adanya perubahan mitos-mitos (demitologisasi).

*Dalam konteks Indonesia tidak mudah mendemitologisasi syariat Islam dan khilâfah. Sebab, masyarakat Indonesia sangat religius. Menurut Anda, sejauh mana batas-batas dari nilai-nilai Islam bisa lestari di wilayah publik, baik dari tingkat civil society maupun negara, lantaran konsep kaffah mengandaikan Islam meliputi ruang privat sekaligus publik?*

Oke, saya setuju. Saya kira, penolakan umat Islam terhadap sekularisme juga beralasan. Sebab, kalau semua urusan publik diserahkan kepada *civil society* atau kepada sistem sekular, saya kira umat Islam tidak bisa menerimanya. Karena, mereka berkeyakinan bahwa agama mempunyai peran dan wewenang yang bisa menyatukan. Dalam hal ini memang ada peran agama yang bisa disatukan. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita menyatukan orang-orang Indonesia dengan segenap pluralitasnya, saya kira, hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa, di negara ini, Islam sudah menjadi identitas yang melekat. Bahkan, dalam hal tertentu, kita tidak dapat memisahkan antara identitas sosial, etnis, maupun identitas agama. Semua telah menyatu.

Ketika Islam menjadi identitas, maka Islam pun dapat menjadi *pertama*, modal budaya (*cultural capital*). Apapun yang dikembangkan dalam kebudayaan – bagaimana membangun sebuah masyarakat dan seterusnya – pasti dipengaruhi dan diwarnai oleh Islam. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mengapa perayaan Idul Fitri lebih ramai dibanding Idul Adha? Karena orang Islam di Indonesia mewarnai idul fitri dengan nuansa budaya saling memaafkan kepada orang tua. Dan *kedua*, karena itu sudah menjadi identitas, maka secara otomatis Islam juga menjadi modal politik (*political capital*). Saya kira hal itu wajar dan masuk akal. Karena Islam sudah menjadi identitas kolektif, yang dapat menyatukan massa, maka Islam menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Bayangkan saja, misalnya, seorang da'i sekaliber KH. Zaenuddin MZ dan Aa Gym bisa mengumpul-

---

Selama ini, agama – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisah-kan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

---

kan jutaan orang, baik dengan maupun tanpa membayar. Itu merupakan sebuah kekuatan kapital yang sangat luar biasa. Maka wajar saja kalau ada orang yang mempunyai minat politik memanfaatkan Islam sebagai *political capital*. Berawal Islam sebagai *cultural identity*, menjadi identitas kuat yang kemudian menjadi *cultural capital* dan meningkat menjadi *political capital*.

Kini, seiring perkembangan zaman, *ketiga*, Islam bahkan telah menjadi modal ekonomi (*economical capital*). Industri yang mengandalkan agama kian menjamur, mulai dari layanan *Short Message Service* (SMS) rohani, *tawshyah*, hingga penjualan produk aksesoris Muslim. Bayangkan, berapa banyak nilai uang yang masuk dari layanan SMS Rohani? Tentu banyak sekali. Kita juga menyaksikan banyak sekali acara di sejumlah stasiun televisi yang memanfaatkan dan mengatasmakan agama. Selain itu, seiring gairah berislam yang terus meningkat, butik-butik busana Muslim yang menyediakan pakaian mulai dari jilbab hingga aksesoris lainnya bertebaran di mana-mana. Belum lagi, produk mutakhir dari transaksi keuangan yaitu bank syariah. Semua bank syariah memanfaatkan Islam sebagai *economical capital*. Bahkan, akhir-akhir ini, di Malaysia dan Thailand, asosiasi *halal food* menjadi industri yang sangat besar. Itu terjadi karena Islam ternyata mempunyai *capital market* yang dapat dikembangkan. Sekali lagi, Islam sebagai sebuah *economical capital*, berawal dari Islam sebagai identitas.

Sekaligus menjawab pertanyaan di atas, dengan realitas yang berkembang seputar promosi penegakan syariat Islam dalam wujud kekuasaan politik, hal tersebut hanya akan menghancurkan modal budaya dan politik yang selama ini telah lestari di Indonesia. Sedangkan untuk menjawab kekhawatiran bagaimana kalau syariah atau Islam menyatu di Indonesia, saya kira, kita perlu usaha dan wadah yang mampu merekonstruksi sejarah Islam, sehingga bisa menjelaskan bahwa Islam di Indonesia mempunyai lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan Timur Tengah. Hal ini untuk mendemitologisasi pandangan umat Islam yang selama ini begitu saja mengasosiasikan Islam selalu berorientasi pada Timur Tengah. Jadi, yang perlu didemitologisasi bahwa Islam bukan hanya Arab, tapi ada juga yang lain, yaitu Indonesia. Kita punya hak dan wewenang untuk menerjemahkan Islam sesuai dengan karakter budaya kita sendiri.

*Pemisahan antara agama dan negara terjadi di Barat. Sementara di Indonesia, dengan kondisi sosiologis yang ada, agaknya sulit untuk menerapkan itu. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sifat eksekutif dan ekspansif agama yang sulit untuk didemistologisasi. Bagaimana komentar Anda?*

Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan segenap persoalan yang timbul akibat perbedaan. Di Amerika, mereka sepakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui pengadilan (mekanisme hukum sekular). Jika terjadi konflik antarumat beragama, maka dianggap sebagai persoalan pribadi di antara mereka (*citizenship*), bukan persoalan negara. Dalam hal itu, negara tidak ikut campur. Tapi, begitu menjadi keputusan pengadilan, negara harus menghormati dan menjalankan kewajiban menunaikan keputusan. Namun demikian, negara tidak ikut menjadi bagian dari pihak yang berkonflik.

---

Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang *farḍlu 'ayn* dan *farḍlu kifāyah*.

---

Di Indonesia, persoalan konflik tak terselesaikan bahkan kian karut-marut lantaran negara ikut menjadi pihak yang bertikai. Contoh paling gamblang adalah bagaimana menyelesaikan perbedaan Ahmadiyah dengan Islam *mainstream* yang mengemuka belakangan ini. Saya khawatir, karena dalam dunia Islam, ini sekaligus sebagai otokritik, preseden mekanisme penyelesaian masalah yang telah ada cenderung tidak demokratis. Misalnya, perbedaan antara umat Islam Sunni dan Syi'ah yang telah terjadi sekian lama, tidak pernah ada mekanisme penyelesaiannya yang memuaskan. Yang terjadi adalah mekanisme kalah atau menang. Begitu Syi'ah berkuasa, Sunni tersingkir, sebaliknya begitu Sunni yang menang, Syi'ah disingkirkan.



Kini, di tengah zaman yang sudah terbuka, kita harus mencari mekanisme yang tepat untuk memecahkan konflik. Menurut saya, pemisahan antara agama dan negara –dalam arti negara tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi – bermakna positif. Karena yang berkonflik adalah warga negara, maka yang mestinya menyelesaikan masalah adalah pengadilan. Begitu pengadilan memutuskan, maka negara harus mengamankan keputusan yang dihasilkan. Itulah yang harus ditekankan.

*UIN Jakarta sebagai institusi yang tidak dapat dipisahkan dari wajah Islam Indonesia tentunya memiliki peran yang jelas dalam hal tersebut. Bagaimana proses demitologisasi yang disuarakan UIN Jakarta dalam rangka menempatkan agama dan hal-hal yang bersifat publik secara proporsional?*

Untuk menjawabnya saya akan menceritakan problem pendidikan Islam terlebih dahulu. Selama ini, pendidikan Islam menggunakan pendekatan (*approach*) yang terlampau normatif dan doktrinal. Mempelajari Islam adalah mempelajari ritual, keimanan dan seterusnya. Penekanannya cenderung normatif dan hanya mempertimbangkan al-Quran dan al-Hadits. Karena hanya mengedepankan sisi normatif, studi Islam pun tidak pernah berkembang. Salah satu indikasinya dapat kita lihat pada perdebatan dalam politik Islam yang selama ini selalu masuk ke dalam perdebatan *fiqh siyâsi*; membicarakan pandangan *fuqahâ'* (para ahli fikih) tentang politik. Yang menjadi rujukan selalu al-Ghazali, al-Mawardi dan ulama klasik lainnya. Perdebatan politik seolah sudah menjadi bagian dari ibadah, bahkan menjadi doktrin.

UIN Jakarta mencoba untuk melakukan tambahan atau mereformasi pendekatan studi Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosial (*social and historical approach*). Sebuah pendekatan yang berusaha memahami Islam berdasarkan konteks sosial dan sejarahnya. Sebuah peristiwa atau masyarakat tidak bisa dipahami tanpa memahami konteks sosial dan psikologis yang berkembang. Menurut saya sangat penting mengajarkan umat Islam untuk melihat realitas sosial sebagai realitas sosial, bukan realitas agama. Contoh, tsunami yang menimpa Aceh, kalau menggunakan pandangan normatif-doktrinal, akan selalu dikaitkan dengan pengalaman keagamaan kita. Ada seorang kiai yang mengatakan bahwa tsunami di Aceh terjadi karena perempuan di Aceh tidak berjilbab. Ada

juga yang mengatakan, itu terjadi karena banyak orang Aceh yang tidak salat, bermabuk-mabukan di pinggir pantai. Mereka menghubungkan antara faktor sosial dengan doktrin keagamaan.

Menghadapi persoalan itu, UIN Jakarta ingin memberikan tambahan dalam menganalisis peristiwa sosial. Bagi kami, memahami realitas sosial harus berdasarkan fakta sosialnya. Tsunami, kita pahami sebagai fakta sosial yang bisa dijelaskan secara rasional. Pandangan demikian juga akan berpengaruh pada solusi yang diberikan. Kalau menggunakan doktrin, solusi penyelesaian atau mengatasi tsunami adalah dengan memperbanyak ritual dan doa. Tapi dengan pendekatan sosial (*social approach*) akan terlebih dahulu menganalisis problem lingkungan yang ada. Melalui analisis sosial, solusi yang ditawarkan pun masuk akal, misalnya, jangan membangun rumah di dekat pantai, memasang peringatan dini untuk tsunami, atau yang lainnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini, saya setuju dengan konsep sekularisasi. Agama tidak bisa dijadikan payung hukum untuk memutuskan segala hal. Realitas sosial hendaknya dipotret atau dianalisis melalui konteks sosialnya, bukan dengan doktrin agama. Tentu agama dapat berperan menjadi penerang rasionalitas manusia yang cenderung alpa.

---

Keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain.

---

### *Bagaimana fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks itu?*

Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan *skill* kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan perspektif sosial (*social perspective*). Kenapa ini kita ajukan? Karena umat Islam seringkali begitu lantang menolak sekularisme politik, yang memisahkan urusan politik dengan urusan agama, padahal mereka melakukan sekularisasi besar-besaran dalam masalah pendidikan. Mereka kerap meneriakkan adanya pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan

umum. Pendidikan Islam hanya berisi dan mengajarkan pendidikan agama. Sementara pendidikan umum mengajarkan ilmu-ilmu umum. Bukankah itu jelas-jelas praktik sekularisasi yang telah tanpa sadar mereka lakukan?

Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang *farḍlu 'ayn* dan *farḍlu kifāyah*.

Yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah bahwa umat Islam menolak sekularisasi di bidang politik, sementara melakukannya untuk bidang pendidikan. Ketika IAIN berubah menjadi UIN, banyak orang yang mengkritik dengan mengatakan “IAIN *kok* membuka fakultas umum?” Dengan perkataan itu, si pengkritik seolah menempatkan kewajiban menjadi dokter dan ahli komputer hanya kewajiban kedua (*second*) dari kewajiban menjadi ahli agama.

*Melihat fakta seperti itu tampaknya kita tidak bisa memisahkan sama sekali ruang publik dari peran agama. Persoalannya, agama yang memiliki nilai-nilai kedamaian dan toleransi justru ditampakkan ke publik sebagai sesuatu yang menakutkan, tidak saja bagi yang lain, melainkan kepada intern umat seagama. Perda syariah dan khilāfah Islamiyah misalnya, bagi segelintir kelompok mungkin memberikan angin segar, tapi tidak sedikit kelompok yang merasa terancam dengan pemberlakuannya yang ternyata kontraproduktif. Menurut Anda bagaimana menampakkan Islam di muka publik?*

Saya kira peran pendidikan di sini sangat penting. *Pertama*, kita harus meredefinisi pendekatan (*approach*) kita dalam studi Islam dan menggambarkan diri ke publik dengan baik. *Kedua*, referensi yang kita baca juga harus semakin kaya. Kalau buku-buku yang kita baca sekarang masih sama dengan buku-buku yang dibaca dan diterbitkan oleh ulama-ulama pada beberapa abad yang lalu, kita akan kembali ke jalan yang sama, tidak akan berkembang.

Saya pernah menulis tentang kepemimpinan kaum muda. Tulisan ini didasari ide bahwa kepemimpinan dalam agama tidaklah salah kalau juga diberikan kepada kaum muda. Selama ini kepemimpinan agama selalu berdasarkan senioritas. Sekarang, sudah saatnya kaum muda harus diberi porsi lebih banyak untuk menjadi pemimpin agama. Sebab, kita lahir dan besar di zaman yang berbeda, maka untuk persoalan sekarang kita tidak bisa mengklaim atau menjustifikasi apa yang telah dilakukan oleh orang di masa lalu. Pendidikan kita jauh berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Karena itu pemimpin muda juga harus muncul dalam kepemimpinan agama. Ini penting untuk mengubah persepsi dan orientasi tentang diri kita sendiri, bagaimana mendefinisikan diri kita sebagai bagian dari dunia.

Untuk itu, menurut saya, pemimpin maupun ormas Islam seharusnya mulai memberikan porsi yang lebih besar kepada kaum muda untuk menjelaskan Islam sesuai dengan zamannya. Sekarang kita hidup di zaman komputer dan internet dengan permasalahan yang tentunya terus berkembang. Seharusnya kepemimpinan umat juga perlu memikirkan regenerasi.

---

Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan *skill* kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan perspektif sosial (*social perspective*).

---

*Apakah menurut Anda kehadiran perda syariah dan khilâfah dalam proses sekularisasi di Indonesia adalah sesuatu yang sama sekali tidak kontekstual?*

Ya, menurut saya bukan sekadar tidak kontekstual, tapi juga tidak *applicable*, itu mimpi. Saya selalu bertanya kepada para pengusung khilâfah bagaimana kita mengatasi perbedaan dalam sistem *khilâfah*? Dalam *khilâfah*, seseorang yang melakukan bidah akan disingkirkan dan dibunuh. Pada waktu Abbasiyah berkuasa, orang-orang Umayyah dihabisi. Sementara pada masa Umayyah, orang-orang Syi'ah juga habis. Itulah realitas sejarah kita.

Sekarang kita hidup dalam dunia yang berbeda. Inilah faktanya. Jadi, bagaimana kita mengatasi perbedaan itu? Bagaimana mungkin kita mau

menghakimi kawan-kawan kita yang Syi'ah kalau Indonesia menganut khilâfah? Belum lagi mengatasi perbedaan antara Islam dan non-Islam. Apakah mereka akan dianggap kafir *dzimmi* dan itu berarti menjadi warga negara kelas dua (*second class citizens*)?

Tantangan yang kedua, menurut saya, lebih pada fakta hubungan internasional. Apa yang kita lakukan di Indonesia akan berpengaruh pada masyarakat di dunia internasional, lantas apakah kita rela jika umat Islam di Amerika, Australia, Eropa dan belahan dunia lain menjadi *second class citizens*, yang artinya penduduk Muslim di daerah-daerah mayoritas non-Muslim tidak boleh memilih presiden atau tidak mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih, dan sebagainya. Melihat hal itu, saya kira, konteks penerapan khilâfah sama sekali tidak tepat, tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang pluralis.

*Di sektor ekonomi, sekarang marak bermunculan bank syariah. Apakah itu merupakan implikasi langsung dari tuntutan-tuntutan sejenis (ideologis) di bidang kenegaraan secara umum? Lantas apakah itu murni tuntutan umat Islam secara kultural atau ada nuansa-nuansa lain di balik semuanya?*

Saya tidak tahu persis, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi saya mendapat informasi bahwa yang menjadi nasabah bank Islam di Malaysia ternyata bukan hanya orang Islam, tapi juga orang Cina. Bank Islam di sana, konon lebih *comfortable* ketimbang beberapa bank konvensional. Oleh karena itu, bagi saya, silakan saja ada bank syariah karena itu, sebenarnya, tuntutan ekonomi. Kalau ada dua jenis bank yang melayani masyarakat, syariah dan konvensional, tentunya akan lebih kompetitif, dan itu justru menguntungkan publik. Yang saya tidak setuju adalah kalau ada pemaksaan terhadap umat Islam untuk menabung di bank syariah. Di luar itu, tuntutan bank syariah saya kira merupakan sesuatu yang wajar, karena Islam sudah menjadi *political capital* dan *economical capital*.

Lebih dari itu, di Surabaya dan Jakarta *konon* ada yang disebut dokter Islami. Dalam bidang properti, ada juga perumahan Islami. Toh tetap ada yang memanfaatkan dan membeli itu. Artinya, itu lebih pada persoalan *market*. Yang problem adalah kalau itu diwajibkan, misalnya, semua umat Islam harus tinggal di hotel atau kompleks islami yang sama. Tetapi, bahwa bank syariah dan hal-hal yang islami lainnya tentunya

punya hak untuk muncul, tidak bisa dilarang. Itulah bagian dari identitas dan realitas kita.

*Kalau hal seperti itu begitu saja diterima, apakah tidak kemudian justru memuluskan bentuk formalisasi syariah lain ke dalam negara?*

Tidak, karena bank syariah bukan hanya diberlakukan di negara Muslim, di London pun ada. Inggris adalah negara yang sekular, tapi ia membolehkan bank syariah. Yang tidak boleh adalah formalisasi dalam bentuk *compulsory*, yang mewajibkan semua orang untuk ikut dalam satu bentuk. Di situlah letak problem formalisasi syariah. Tapi kalau kita membuat Universitas Islam Negeri (UIN), masak tidak boleh? Islam di situ adalah identitas. Yang tidak boleh adalah ketika kita mewajibkan umat Islam untuk masuk ke UIN. Itulah yang dinamakan formalisasi, negara ikut campur tangan.

*Kalau formalisasi bagi Anda tidak wajar, maka Anda pun menilai munculnya perda syariah di Indonesia tidak wajar?*

Ya, tidak wajar. Karena itu saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya saya mengartikan tiga hal mengenai perda syariah. *Pertama*, ia merupakan bentuk kebangkitan budaya (*cultural revivalism*). Ini

terjadi karena Islam sudah menjadi identitas lokal. Di Makassar, antara Bugis dan Islam itu sudah susah untuk dibedakan. Demikian juga di Padang dan Madura, sudah sangat susah membedakan yang mana budaya Islam dan yang mana budaya lokal setempat. Hal ini sendiri terjadi bermula dari kebangkitan kultural melawan hegemoni rezim Soeharto, jwanisasi dan sebagainya. Mereka melakukan perlawanan dengan etnik. Karena Islam sudah menjadi etnik, maka yang muncul adalah Islam.

*Kedua*, kebangkitan politik lokal (*political revivalism*). Sekali lagi, ini karena Islam sudah menjadi *political capital*. Maka tidak heran jika di Tangerang muncul perda syariah. Karena Pemda sadar bahwa umat Islam di sana adalah

---

Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan segenap persoalan yang timbul akibat perbedaan.

---

mayoritas, maka dengan memunculkan isu-isu Islam diharapkan akan kembali mendulang suara untuk pemilihannya di masa mendatang. Lihatlah daerah-daerah yang memunculkan perda serupa, kebanyakan wali kota atau gubernurnya bukan berasal dari partai Islam, tapi dari Golkar dan sebagainya. Ini jelas syariat Islam tak lebih digunakan sebagai *political capital*.

*Ketiga*, kebangkitan moral (*ethical* atau *moral revivalism*). Munculnya perda syariah karena dilatari kepentingan moral. Sejak reformasi, tatakrama kita tidak *karuan*. Tidak adanya keteraturan di para pengguna lalu-lintas jalan raya, salah satunya, di mana tidak adanya keteraturan publik inilah yang memicu munculnya kebangkitan moral. Isu moral yang terpikirkan oleh kelompok tertentu adalah bagaimana bisa mengisi demokrasi ini dengan baik. Isu moral itulah yang menurut mereka seksi. Tapi, kita lihat isu ini pada akhirnya mengalami penurunan popularitasnya. Dari tahun ke tahun jumlah pemda yang menerapkan perda syariah semakin menurun. Dugaan saya, itu terjadi karena ternyata perda seperti itu tidak menguntungkan bagi partai-partai politik. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa perda syariah lebih kental bernuansa politik daripada nuansa agamanya.

*Beberapa pemikir berpandangan bahwa periode awal Islam sebenarnya masa di mana Islam tumbuh liberal. Pemikiran keislaman tumbuh secara bebas dan tidak terbatas atau monolitik. Tetapi fase setelahnya, Islam justru sampai kini menjadi illeberal Islam. Demikianpun di Indonesia, ketika angin segar liberalisme Islam berhembus dalam bentuk kebebasan berpikir, penolakan yang muncul tak kalah sengitnya. Bagaimana Anda menjelaskan liberalisme dalam Islam?*

Sebagaimana sekularisme, liberalisme lahir dan besar dari sebuah konteks sosial dan sejarah yang berbeda dengan Islam. Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan “kesakralan” alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita. Selama ini umat Islam sudah terkungkung atau terkotak pada sejarah dan konteks yang sudah mapan. Ini sudah berlangsung dari mulai adanya formalisasi Islam. Karena telah berlangsung sangat lama, sekali ada yang

mencoba loncat dari pagar formalisme atau sekadar mempertanyakan batasan lingkungan tersebut, dianggap sebagai orang yang aneh.

Saya memahami teman-teman yang ingin meloncati pagar atau coba melakukan liberalisasi, memang, hendak melakukan beberapa hal yang berbeda. *Pertama*, Karena Islam besar dan berkembang di tengah budaya Arab atau *Arabic speaking countries*, kemudian ke Turki, India, Cina dan akhirnya berkembang ke Indonesia, jelas memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Dengan begitu dirasa perlu juga adanya pendekatan yang berbeda. Ini dilakukan tak lain untuk coba menerjemahkan Islam ke dalam budaya Indonesia.

*Kedua*, liberalisasi bermaksud membebaskan umat Islam agar berpikir hari ini, tidak berpikir masa lalu. Jangan hanya terkungkung dengan sejarah bahwa seolah-olah pemerintahan pada masa khalifah seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, adalah bayang-bayang yang harus kita wujudkan sekarang untuk mengatasi problem zaman. Sebuah idealisasi terhadap masa lalu bagi kalangan liberal sama sekali tidak realistis. Walaupun harus diakui pula bahwa teman-teman yang mendukung Islam liberal tidak mempertimbangkan realitas budaya Islam Indonesia yang sudah melekat. Karena itu, perlu kearifan dalam menyikapi realitas Islam di Indonesia.

---

Selama ini, agama  
 – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

---

*Tapi ada sementara kalangan yang beranggapan bahwa beragama adalah sebetuk ketundukan paksa, tidak bisa bebas. Apa respon Anda dengan pernyataan seperti itu?*

Hukum memang selalu memaksa. Pemaksaan justru ada dan dimungkinkan karena adanya hukum. Pada dasarnya hukum Islam berasal dari pembakuan ajaran Islam yang dipraktikkan Nabi dan para Sahabat. Hukum itulah yang memaksa orang untuk mengikutinya. Misalnya salat Tarawih adalah ritual yang awalnya dibiasakan oleh Umar. Lambat-laun, karena telah biasa,



seakan-akan menjadi hukum. Perayaan Maulid Nabi, dulu dipakai untuk menyemangati tentara Islam, sekarang menjadi ritual simbol tradisi Islam. Hukum bermula dan berdasar pada preseden. Yang membuat suatu agama memaksa juga adalah preseden. Karena dulu umat Islam begini, maka sekarang harus begini juga. Menurut saya, pemahaman seperti ini sudah tidak bisa lagi dipakai, karena jelas kini memiliki konteks yang jauh berbeda dengan dahulu. Saya kira memang perlu ada kesepakatan baru untuk memahami agama.

Tapi, secara antro-pologis, apa yang diungkapkan oleh orang atau kelompok yang tadi Anda sebutkan adalah betul. Betul bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terpaksa. Tapi, keterpaksaan yang dimaksud terjadi karena adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tak jarang berupa sesuatu yang bersifat turun-temurun. Dan karena sudah terbiasa, maka menjadi hukum. Oleh karena itu, tak salah kalau sekarang kita perlu kembali membuat kesepakatan bersama sesuai dengan konteks zaman yang kita hadapi.

*Formalisasi hukum-hukum agama, seperti perda syariah, pada praktiknya tidak memberikan kebebasan. Beberapa penelitian tentang perda syariah menyebutkan bahwa justru dengan perda syariah perempuan dimarginalisasi, kebebasan beragama diberangus dan ruang dialog perbedaan agama menjadi tidak dimungkinkan. Bagaimana menurut Anda?*

Menurut saya problemnya bukan di situ, melainkan pada mekanisme yang digunakan oleh masing-masing sistem. Dalam demokrasi individu diberikan kebebasan untuk bersuara. Individu-individu sebagai warga negara menentukan konsensus bersama, sementara dalam agama (Islam) kesepakatan selalu berasal dari elite (ulama), bukan dari *grassroot*, individu-individu penganut agama. Dalam hal ini, misalnya, MUI yang merepresentasikan elite agama dan punya hak untuk menentukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama.

Sekarang ini kita hidup dalam zaman demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan pengalaman yang berbeda-beda. Agama juga seharusnya tidak hanya mendasarkan diri pada otoritas elite, sebaliknya, sudah saatnya mempertimbangkan publik. Inilah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita harus membuat kesepakatan mengenai mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. Dari situ, kita juga bisa bertanya, sebenarnya siapa yang berhak memutuskan persoalan perda syariah

dan sebagainya? Menurut saya, sekarang sudah saatnya coba bertanya kepada publik, apakah mereka betul-betul memerlukan perda syariah? Kalau memang masyarakat memerlukannya, *why not*, toh itu sikap rakyat. Tapi kalau ternyata mereka tidak butuh, kenapa dipaksakan?

*Apakah dengan begitu tidak malah kian memuluskan daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk menerapkan aturan sesuai dengan suara mayoritas? Bali misalnya, kalau seperti itu, bisa saja membuat Perda Hindu, Manokwari membuat Perda Injil. Bukankah itu akan mendiskriminasikan kaum minoritas?*

Dalam hal ini, menurut saya, juga perlu adanya kesepakatan. Meskipun Amerika adalah negara demokrasi, tapi tetap ada negara bagian tertentu yang menerapkan hukum yang sangat khas. Misalnya di Brigham Young University, di Utah menganut paham Mormon, di sana kita dilarang minum teh di lingkungan kampus. Atau masyarakat Amis di bagian negara Pennsylvania, yang menolak memakai listirik dan kendaraan bermotor, tetap bisa

berjalan. Dan itu bisa dijalankan karena telah menjadi kesepakatan, sebuah kesepakatan untuk tidak salah dengan melakukan kekerasan, dan, tentu saja, menghormati hukum yang telah disepakati bersama. Yang agak krusial dan kerap menjadi perdebatan di Indonesia adalah seringkali simbol-simbol syariah masuk ke dalam hukum positif negara.

Menurut saya, sekarang dibuka saja semua peluang membuat regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal setiap daerah. Karena di Bali, misalnya, tanpa kita sadari sebenarnya sudah melakukan hukum Hindu, meski tak dikatakan secara tertulis. Misalnya, kalau hari Nyepi tidak boleh ada yang keluar. Itu kan “syariat” Hindu? Jadi, sebenarnya ada daerah-daerah tertentu yang sudah menerapkan perda seperti itu, bukan hanya yang secara ekstrem, seperti yang terjadi di Aceh.

---

Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan “kesakralan” alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita.

---

*Para pengusung perda syariah mengklaim tuntutan mereka telah melalui prosedur yang demokratis. Tapi tak dapat dielakkan bahwa beberapa item hukum pada perda syariah mengandung hal-hal yang antidemokrasi. Pemerintah harusnya berperan tegas dalam urusan ini. Bisakah perda syariah yang antidemokrasi dieliminir oleh pemerintah dengan kekuatan demokrasi?*

Kalau negara benar-benar mau mengambil perannya sesuai dengan amanat konstitusi dan berpegang pada asas demokrasi, itu seharusnya bisa. Tidak akan muncul perda syariah kalau negaranya kuat. Untuk itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus berani bersikap tegas. Di Amerika pun tidak jarang ada umat Katolik yang coba memaksa memasang salib di kantor tempatnya bekerja atau di tempat-tempat publik lainnya. Tapi karena pengadilan mampu bersikap tegas dengan konstitusi sebagai kesepakatan bersama, itu tetap tidak diperbolehkan. Maka menurut saya, sudah seharusnya Mahkamah Agung kita secara aktif mereview semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Amerika yang begitu tegas menegakkan konstitusi dan dianggap sebagai kampiun demokrasi, tetap memiliki satu daerah di California yang melarang pengajaran teori evolusi, karena dianggap bertentangan dengan agama. Dengan ini, bukan berarti praktik sejenis boleh terjadi di negara kita. Kita tetap punya kewajiban konsisten dengan konstitusi yang telah menjadi konsensus bersama. Karenanya, tugas berat kita di sini adalah bagaimana mendisasosiasikan syariah dengan negara Islam, baik bagi orang luar maupun umat Islam sendiri. Selama ini, begitu muncul *term* syariah, yang terpikirkan baik oleh umat Islam maupun orang luar adalah negara Islam. Di sinilah demitologisasi mutlak diperlukan. Kalau ada orang atau kelompok di daerah manapun berkeinginan membuat perda yang melarang praktik maksiat, sebut saja Perda Antimaksiat, jangan memakai sebutan perda syariah. *Toh* di Ohio, Amerika Serikat, yang *notabene* tidak mayoritas Muslim, perjudian dan alkohol juga menjadi sesuatu yang terlarang. Artinya, jangan hanya karena kita mayoritas beragama Islam, simbol-simbol agama mayoritas harus dikedepankan. Kalau tanpa embel-embel simbol agama, namun manfaat yang dihasilkan sama-sama baik dan diterima publik, tentu tetap tidak salah dan akan tetap dinilai baik.

Sekali lagi, wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan

memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Sejak masa perjuangan hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya. Indonesia bukanlah negara yang berdasar pada ideologi atau agama tertentu.

*Pluralisme adalah isu yang juga menjadi konsentrasi Anda. Salah satu tindakan yang bisa mencederai ini adalah gerakan radikal yang kerap muncul dalam agama-agama. Pertanyaannya, apakah yang Anda pahami dengan pluralisme?*

Indonesia memang bangsa yang plural sejak sebelum Islam datang ke Indonesia. Kekayaan dan kelebihan Indonesia adalah di keanekaragaman budayanya. Dalam masyarakat yang beragam tentu diperlukan sikap terbuka

dan toleran terhadap perbedaan budaya dan perilaku. Maka gerakan radikal, baik dalam bentuk agama maupun ideologi, hanya akan mencederai sikap terbuka dan toleran yang selama ini menjadi pilar keutuhan Indonesia.

---

Sejak masa perjuangan hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya.

---

*Anda pernah menulis buku tentang Gerakan Salafi Radikal di Indoensia, bisakah Anda jelaskan apa isi dan maksud dari buku itu?*

Buku itu ditulis untuk memberikan kerangka teoretis atau cara memandang radikalisme. Dalam dunia akademik, penjelasan akan radikalisme sudah begitu banyak bermunculan. *Pertama*, ada yang mengidentifikasikannya sebagai reaksi dari kondisi kemiskinan. Menurut pendapat pertama ini, kemiskinan yang dibumbui oleh pemahaman agama tertentu bisa berubah wujud menjadi gerakan yang terkonsolidasikan. Ia bisa muncul dalam bentuk “pemberontakan”. *Kedua*, fundamentalisme muncul dari paham agama yang ekstrem. Pemahaman agama yang cenderung literal akan membawa seseorang bersikap radikal.

*Ketiga*, fundamentalisme lebih menjadi gerakan yang berlatar alasan politik, yaitu menjadikan radikalisme sebagai pintu masuk menyuarakan aspirasi politik. Dengan bersikap radikal, seseorang atau kelompok akan diperhatikan oleh orang lain, karenanya mempunyai nilai jual politik. *Keempat*, radikalisme menjadi semacam gerakan ratu adil. Karena situasi ekonomi politik mengalami kekacauan, muncullah semangat menyelesaikan masalah yang biasanya kerap diidentifikasikan dengan kehadiran ratu adil. Salah satunya diyakini bisa hadir dari agama. Celakanya, pemahaman yang dibawa memiliki kecenderungan yang radikal.

Analisis itulah yang saya pakai untuk melihat kenyataan sosial di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, saya temukan beberapa organisasi yang bisa dikategorikan memiliki garis perjuangan radikal. Sebut saja organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah (JI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Selanjutnya, saya juga melihat ada benang merah di antara kelompok-kelompok tersebut, yaitu kecenderungan *middle-eastern minded*. Saya lihat mereka mempunyai kesamaan dalam menganggap diri sebagai salaf. Padahal NU dan beberapa ormas lain yang cenderung tidak radikal juga mengaku salaf. Pada titik itu, menurut saya, salaf telah di-*hijack* oleh Wahhabisme dan gerakan radikal lainnya.

Dalam identifikasi saya, radikalisme ini ditandai dengan kriteria seperti ingin menegakkan negara Islam, melihat pertentangan Islam dan Kristen sebagai jihad, perang abadi di antara keduanya, dan beberapa kriteria lainnya. Dari situ, kemudian saya membagi lagi kelompok-kelompok radikal tersebut ke dalam dua kutub besar. *Pertama*, kelompok yang lebih mengedepankan *activism*, dengan aktif berdemonstrasi dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik. Dan *kedua*, adalah kelompok yang cenderung bermain di tingkat diskursus, wacana. Kelompok pertama diwakili oleh FPI, Laskar Jihad dan sebagainya. Sementara kelompok kedua diwakili oleh HTI dan MMI. Mereka memang tidak *violence*, tapi secara akal dan wacana menentang demokrasi dengan sangat radikal.

*Bagaimanapun radikalisme menjadi gerakan yang antipluralisme. Mereka cenderung memaksakan "nilai-nilai keagamaan tertentu" dianut oleh tidak hanya bermacam umat Islam tapi juga non-Muslim sebagai paham yang disepakati bersama dengan menampik paham lain yang berbeda. Indonesia*

*sebagai negara yang plural mestinya tidak mungkin melahirkan gerakan-gerakan fasis seperti itu. Bagaimana Anda menjelaskannya?*

Saya kira Islam, baik secara ideologi maupun kultur, hidup dalam masyarakat yang plural. Sejak zaman Madinah, bermacam etnis yang bergabung dan mengikatkan diri sebagai satu komunitas ternyata banyak sekali mempunyai perbedaan. Islam menjadi payung yang luar biasa untuk mewujudkan pluralisme pada saat itu. Makanya, menurut saya, pengalaman Islam dalam hal itu sebenarnya lebih kaya ketimbang Katolik dan Kristen. Lihat saja, dari Maroko sampai ke Indonesia yang dinamakan sufi itu bermacam-macam, sebutannya pun berbedabeda, itu karena secara teologis Islam mengakui pluralisme. Coba lihat arsitektur masjid yang sangat kaya dibandingkan dengan bentuk gereja yang sangat dipengaruhi oleh Roma Katolik. Belum lagi bentuk pakaian. Di situ kita punya sajadah dan sarung dari berbagai tempat; Bangladesh, Pakistan, Indonesia dan lainnya. Itu semua mungkin terjadi karena ajaran kita kental dengan nuansa toleransi. Islam sendiri, baik secara sosiologis maupun teologis, mestinya toleran. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan inilah yang menurut saya akan membawa Islam pada kebesarannya.

---

Wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita.

---

*Celakanya, di Indonesia, gerakan radikal didukung oleh MUI, suatu lembaga agama yang semi negara. Dari sinilah muncul apa yang kita sebut dengan monisme dalam beragama. Masyarakat Islam yang memiliki pemahaman keagamaan lain, seperti Ahmadiyah, menjadi tidak mungkin hidup bersama dalam bingkai kesatuan bangsa.*

Yang perlu didefinisi sekarang, menurut saya, adalah siapa yang berhak mengeluarkan fatwa? Ingat, sekarang zaman sudah berubah, tidak bisa kita

samakan dengan masa Nabi dan para Sahabatnya. Di zaman internet ini, ada yang kita kenal dengan sebutan *online fatwa*. Seseorang bisa mencari fatwa dalam tema dan masalah apapun lewat *google*. Dan melalui *online fatwa*, kita bisa memilih fatwa mana yang cocok dan tidak dengan pikiran kita. Jadi, kalau kita tidak sepakat dengan satu pendapat bisa memilih pendapat lain yang lebih sesuai menurut kita.

Dengan begitu saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa Islam, tidak hanya secara sosiologis melainkan juga teologis, adalah agama yang pluralistik. Bayangkan saja, pada tradisi agama mana yang mentolerir perbedaan dalam ilmu kalam? Hanya dalam Islam. Tradisi mana yang kaya dengan mazhab? Sekali lagi, Islam. Bahkan dalam tradisi Islam juga memiliki perbedaan yang demikian kental seperti Sunni dan Syi'ah. Artinya, tak dapat disangkal bahwa Islam sejatinya adalah agama yang mengunggulkan pluralisme.

*Namun demikian, kita juga tak bisa mengabaikan begitu saja paham atau peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kecenderungan anti-pluralisme dalam Islam. Pertanyaannya, dengan konteks seperti itu, bagaimana Anda melihat pluralisme di masa mendatang di Indonesia, akan makin terkonsolidasi atau sebaliknya aus untuk kemudian benar-benar musnah?*

Perlu usaha bersama untuk terus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa kemajemukan bangsa Indonesia adalah takdir sosial. Oleh karena itu harus ada usaha terus menerus untuk menjaga agar umat Islam memahami realitas sosial Indonesia yang majemuk. Partisipasi di kalangan anak muda untuk penyadaran realitas plural ini perlu dikembangkan, agar ada pemahaman yang tak putus antar-generasi.

*UIN Jakarta sering diidentikkan dengan Muslim Sunni. Padahal lembaga pendidikan mestinya tidak sektarian. Kalau mau menjadikan UIN sebagai pusat studi Islam, maka seharusnya semua warna Islam pun muncul di UIN Jakarta. Faktanya, kurikulum UIN masih kerap dikatakan Sunni oriented. Apa penjelasan Anda?*

Saya kira ada benarnya. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena Syi'ah juga mendapat proporsi yang besar di UIN Jakarta. Buku-buku

Murthada Mutahhari juga kita pakai sebagaimana buku-buku ulama Sunni atau lainnya. Bahkan kita mempunyai *Iranian Corner*, bekerjasama dengan Kedubes Iran. Kita juga mengirim mahasiswa dan dosen ke Iran untuk belajar Syi'ah. Secara akademik sesungguhnya kita bersikap *balance* terhadap Syi'ah. Buku-buku Syi'ah juga kita berikan kepada mahasiswa. Tapi karena banyak mahasiswa yang hidup di lingkungan Sunni, mereka tentu cenderung mengikuti yang Sunni.

*Tapi, secara umum, sebagai pusat studi Islam, UIN Jakarta dirasa belum cukup lengkap karena belum menampung semua aliran Islam yang ada di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan lainnya. Bagaimana jika ada orang luar yang ingin mengkaji Islam dalam wajahnya yang berbeda (Ahmadiyah dan lainnya)? Bisakah UIN Jakarta memfasilitasinya?*

Kalau Ahmadiyah memang belum. Sekarang kita sedang membentuk sebuah tim riset untuk menilai agama-agama lokal, bukan hanya Ahmadiyah. Indonesia juga punya Islam *Wetu Telu* di NTB, juga ragam warna lokal lainnya seperti di Kuningan, Jawa Timur dan lainnya. Itu juga bagian dari kajian kita. Tapi bahwa UIN Jakarta sangat identik Sunni, itu tidak bisa dipungkiri. Meski demikian, kita juga tetap memberikan perhatian yang besar kepada non-Sunni. Intinya, kita mencoba bersikap *balance*. Karena harus diingat, salah satu keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain. Selama ini kita tidak banyak mengajarkan perbedaan dalam Islam sendiri, karena itu buku-buku yang kita ajarkan di sini mencoba mengambil dari berbagai mazhab, supaya sekat-sekat fikih tidak menjadi formalistik, lebih dari itu fikih menjadi bagian dari pilihan (*choice*). Kalau kita bisa membobol sekat perbedaan mazhab, pasti kita bisa membobol perbedaan sekat etnik, agama, wilayah, negara dan sebagainya. Itulah keinginan UIN Jakarta.



Percakapan dengan

Kautsar Azhari Noer



**Kautsar Azhari Noer**, Guru Besar Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, STF Driyarkara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak 2007 ia diangkat sebagai Honorary Fellow Ibn Arabi Society yang berpusat di Oxford.

---

Kebebasan beragama bersifat mutlak dan harus mendapat jaminan dari negara. Tanpa kebebasan tidak dimungkinkan iman yang tulus. Dan karena sekularisme tidak mesti memusuhi agama, maka pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan agama harus dilakukan. Sebab di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama (teokrasi), peraturan yang diterapkan pasti yang sealiran dengan agama yang diimani penguasa: kebebasan beragama tercabut. Padahal hak-hak dan kebebasan sipil terjamin pada negara-negara yang menganut sistem liberal. Kaitannya dengan kemajemukan agama, masyarakat harus ditanamkan sikap toleran; paham teologis sama sekali tidak boleh dihakimi manusia, yang berhak menghakimi Tuhan semata. Sehingga pluralisme menjadi niscaya.

*Kita akan memperbincangkan seputar tiga isu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Tentang ketiga isu ini, respon masyarakat terbagi menjadi tiga: ada yang menolak, setuju, dan ada juga yang sementara dalam proses memaknai. Ketiga kelompok masyarakat ini, tentu saja, memiliki argumentasi masing-masing. Bagaimana Anda melihat perbedaan respon tersebut dan bagaimana pula pandangan Anda tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sendiri?*

Penolakan umat Islam dan MUI terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa jadi, karena kesalahpahaman. Kadang-kadang, orang belum mengetahui dan memahami betul apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme, tetapi secara *a priori* sudah menolaknya. Ini yang sering terjadi. Celakanya, semua ini kerap tanpa didasari dengan argumentasi. Mereka, termasuk di dalamnya MUI, dengan serta-merta menentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme, begitu pula terhadap Islam liberal. Padahal, yang sering terjadi, atau memang itu sudah terjadi, adalah apa yang dimaksud dengan ketiga paham itu oleh para pendukungnya dan oleh mereka yang menentangnya sungguh berbeda. Misalnya, sekularisme. Tidak selamanya gagasan ini berarti memusuhi agama. Ada yang mengatakan bahwa pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan agama harus dilakukan. Tetapi pemisahan tersebut tidak mesti berarti memusuhi agama. Sebab, kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasanya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

Negara yang didominasi oleh satu agama atau satu mazhab, yang kita sebut dengan negara teokratis, maka peraturan yang diterapkan di negara itu pasti yang sealiran dengan agama atau mazhab yang didukung oleh penguasa. Di situ, saya kira, tidak ada kebebasan beragama. Atau, paling tidak, kebebasan beragama di situ sangat sempit. Di Arab Saudi misalnya, jangankan gereja berdiri di Riyadh atau Mekah, kalau tidak salah, masjid untuk Syi'ah saja tidak ada. Mungkin ada, tapi tersembunyi.

Sebaliknya, di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilakan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

Kendati demikian, sekularisme juga bermacam-macam. Kita harus terlebih dahulu melihat sekularisme yang seperti apa. Sebab, praktik sekularisme di Uni Soviet, agama malah ditekan dan dimusuhi. Namun, lagi-lagi, karena sekularisme berbeda-beda, maka yang harus diperjuangkan adalah model sekularisme yang tidak memusuhi agama.

Saya pernah mendapat kuliah dari Karl Steenbrink, seorang sarjana Belanda. Dia pernah mengatakan bahwa pengertian sekularisme dan sekularisasi seperti karet. Karet itu elastis: bisa ditarik secara lebih luas dan longgar. Artinya, ini sangat tergantung pada siapa yang akan memberi makna terhadap sekularisme dan sekularisasi itu.

Bagi kelompok garis keras, sekularisme adalah musuh agama. Pokoknya, kalau mereka mendengar kata sekularisme – dan yang di Indonesia lazimnya dipersandingkan kepada tokoh-tokoh semacam Nurcholish Madjid (Paramadina), Ulil Abshar Abdalla (Jaringan Islam Liberal), dan Gus Dur – bayangan mereka adalah bahwa sekularisme berbahaya terhadap Islam. Padahal tidak seperti itu. Apakah orang-orang sekular seperti Cak Nur, Gus Dur, dan Ulil memusuhi

Islam? Jawabannya sudah pasti tidak. Justru sebaliknya, mereka ingin mengangkat Islam atau membebaskan Islam dari kungkungan-kungkungan kemunduran, kejumudan dan kekakuan. Mereka menghendaki supaya Islam lebih fleksibel dan bisa menjawab tantangan masa kini. Karena tantangan-tantangan zaman berubah, maka tafsir atas

---

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru ke-bebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimasukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain, sejauh tidak berbuat anarki. Saya lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

---

agama untuk menjawab tantangan-tantangan itu juga bisa berubah, bahkan harus diubah.

Tafsir terhadap Islam juga bermacam-macam, tidak tunggal. Apakah semua tafsir itu benar dan apakah semua tafsir yang dulu sesuai dengan semua zaman dan sanggup menjawab tantangan masa kini dengan problem lokalitas yang berbeda-beda? Itu belum tentu.

*Di kalangan umat Islam ada kelompok-kelompok tertentu seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya, memiliki imajinasi politik bahwa ada kesatuan antara agama dan kekuasaan (al-dîn wa al-dawlah). Bagaimana Anda memandang hal ini?*

Terkait hubungan antara agama dan negara, Islam tidak memberikan aturan yang jelas mengenai konsep negara. Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara Sahabat mengenai *khilâfah* menunjukkan bahwa al-Quran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan jabatan kepala negara setelah Nabi saw wafat. Al-Quran juga tidak pernah memberi aturan ihwal proses pengangkatan kepala negara, berapa lama masa jabatan kepala negara, dan bagaimana proses suksesinya. Al-Quran juga tidak memberikan aturan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip universal, yang tidak hanya berlaku dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain dan sistem-sistem filsafat. Misalnya, keadilan, kejujuran, dan sistem *al-syûrâ* atau musyawarah – yang masih diperdebatkan apakah sama dengan demokrasi atau tidak.

Jadi, dalam konteks ini Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

*Bagaimana dengan gagasan negara Islam atau Piagam Jakarta yang selalu dirujuk dari konsep Piagam Madinah?*

Jawabannya jelas. Gagasan negara Islam, seperti tadi saya katakan, tidak terdapat aturan yang jelas dalam al-Quran. Al-Quran hanya menganjurkan bagaimana memerintah sejauh dibimbing oleh moral. Tidak ada konsep negara. Islam memberikan bimbingan moral kepada para pemeluknya. Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata “islam” dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata “islam” telah mengalami inflasi. Dulu ketika pertama kali ayat turun, *Iqra’*, tidak disebut kata islam.

Yang jauh lebih banyak dalam al-Quran adalah kata *imân*. Nama-nama disiplin keilmuan dan nama-nama karya dahulu tidak memakai kata ‘islam.’ *Târîkh al-Thabarî*, misalnya, tidak disebut dengan *Târîkh al-Islâm al-*

*Thabarî*. Begitu pula *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* dan kitab-kitab lain tidak menggunakan kata ‘islam.’ Madrasah terkenal pada masa Abu Hamid al-Ghazali, yaitu *al-Nizhâmiyah*, tidak disebut *al-Madrasah al-Islâmiyah al-Nizhâmiyah*. Sekarang ini kata ‘islam’ banyak dipakai: negara Islam, sains Islam, bank Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Dahulu banyak yang memiliki kualitas Islam, tanpa menyebut kata ‘islam.’ Tetapi sekarang terbalik, mereknya Islam, isinya belum tentu.

---

Kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasa-nya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

---

*Menurut Anda, apa sebenarnya liberalisme dan mengapa banyak orang begitu rupa menentanginya?*

Liberalisme mempunyai banyak arti. Ada yang mengartikannya sebagai pendapat atau kepercayaan yang bebas, khususnya dalam politik. Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan atau kebijakan yang bebas, khususnya berkaitan dengan politik, perubahan sosial, agama, dan lain-lain. Ada yang sekadar memahaminya sebagai prinsip dan ide yang bebas.

Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan kepada kemajuan dan pembaruan. Ada juga yang mengartikannya sebagai sifat atau keadaan untuk menjadi bebas, khususnya dalam wacana filsafat politik yang membela kebebasan pribadi, bersifat individual; yang memperjuangkan bentuk pemerintahan yang demokratis; dan upaya pembaruan yang berangsur-angsur dalam institusi politik dan sosial.

Saya pribadi lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru kebebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimasukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak berbuat anarki. Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat. Di Indonesia, misalnya, ada orang yang mencantumkan kata Islam dalam KTP-nya agar mendapatkan kemudahan urusan administratif dan kependudukan meskipun agamanya bukan Islam.

*Terdapat semacam kekhawatiran sekelompok umat Islam tertentu yang menginginkan negara ikut campur dalam urusan agama. Sebab, kalau negara tidak*

*ikut campur, menurut mereka, negara dan, terlebih lagi, agama, akan terkikis oleh ideologi-ideologi lain. Apakah ketakutan semacam itu cukup beralasan?*

Barangkali dari perspektif orang yang merasa ketakutan, tentu mereka punya alasan. Tapi bagi kita, tentu saja, tidak. Dalam demokrasi, kebebasan setiap individu dijamin. Yakni, kebebasan individual sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah Usman Roy atau Lia Aminuddin, misalnya, mengganggu kebebasan umat Islam lainnya, sehingga negara ikut campur dan harus mengadili dan memenjarakan mereka? Mungkin bagi sekelompok umat Islam yang tidak mampu menerima kebebasan dan perbedaan, keyakinan yang dianut Usman Roy dan Lia Eden mereahkan. Tetapi itu hanya dalam pikiran mereka saja. Itu semata ketakutan yang berlebihan, di mana kalau keyakinan-keyakinan seperti itu dibiarkan akan menjadi saingan mereka, di samping juga akan bertambah banyak pengikutnya. Jadi, bukan karena keyakinan-keyakinan tersebut mengganggu dan memaksa sehingga hak-hak dan kebebasan mereka terancam.

---

Di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilahkan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

---

*Kalau alasannya karena penodaan akidah Islam?*

Menurut saya sejauh perbedaan paham tidak mengganggu, maka tidak bisa dikatakan seperti itu, walaupun pahamnya menurut kita aneh. Saya selalu berkata: kalau Anda tidak setuju dengan paham yang Anda anggap sesat, silakan Anda dakwahi orang itu. Tetapi berdakwah sudah ada ketentuannya dalam al-Quran: “*Ud’u ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw’izhah al-hasanah wa jâdil-hum bi al-latî hiya ahsan*” (“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik,” al-Quran 16: 125). Cara berdakwah itu ada tiga macam: (1) hikmah atau bijaksana; (2) nasihat yang baik; dan (3) berdebat dengan cara yang lebih baik. Bila orang lain tidak menerima



apa yang didakwahkan, tidak apa-apa. Batasnya adalah bahwa orang itu tidak mengganggu kebebasan kita. Jika ada orang Kristen atau orang Hindu memaksa kita (supaya pindah ke agama mereka), kita mungkin akan tersinggung. Atau, misalnya, jika ada orang Kristen datang ke rumah kita membawa Bibel atau Alkitab, wajar kita tersinggung. Namun, karena secara pribadi latar belakang atau basis saya adalah studi Perbandingan Agama, berbeda dengan kebanyakan orang, saya tidak tersinggung. Kalau mereka mengajarkan ajaran mereka di sekolah milik mereka, tentu saja tidak ada masalah. Itu adalah sekolah mereka. Akan tetapi, kalau mereka sampai mengganggu tetangga, masuk rumah tetangga, misalnya, itu baru masalah.

Kita harus bisa membedakan antara perihal kepercayaan dan perihal mengganggu ketertiban umum. Acara ritual keagamaan dengan pengeras suara yang mengganggu orang lain adalah persoalan. Contoh lain adalah mendirikan gereja di satu lingkungan tertentu. Jika gereja itu penuh oleh jemaat yang berakibat dengan parkir yang mengganggu tetangga sebelah atau jalanan umum, ini tentunya menjadi persoalan. Namun, hal seperti ini masih bisa diatasi dengan terlebih dahulu ditegur agar tempat parkir mobil pindah, misalnya, atau agar datangnya tidak menggunakan mobil pribadi. Dalam kasus seperti ini, harus dipisahkan antara pendirian gereja dan ketertiban parkir. Hanya saja persoalan seperti itu sering berubah menjadi persoalan yang menimbulkan konflik – dan dijadikan alasan bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan seperti pengusiran serta penghancuran gereja. Padahal, menurut saya, harus dipisahkan antara ketertiban umum dan paham teologis. Paham teologis tidak boleh dihakimi oleh manusia. Yang berhak menghakiminya hanyalah Tuhan. Al-Quran beberapa kali menyerukan, di antaranya, *“Fallâhu yahkumu baynahum yawm al-qiyâmati fîmâ kânû fihî yakhtalifûn”* (“Maka Allah menghakimi (menetapkan hukum) di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan,” al-Quran 2: 113). Kita tidak berhak menghakimi paham teologis atau kepercayaan seseorang. Ini merupakan ketentuan Tuhan. Maka, Ahmadiyah, aliran Usman Roy, Lia Eden tidak boleh dihakimi dan dizalimi. Sebab, itu semua adalah kehendak Allah. Allah berkata, *“Wa-law syâ’a rabbuka la-âmana man fî al-ardli kulluhum jamî’an. A-fâ anta tukrih al-nâsa hattâ yakûnû mu’minîn”* (“Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini

beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin,” al-Quran 10: 99). Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya seluruh umat manusia menjadi penganut satu paham saja.

Jika demikian, kalau kita tidak setuju dengan orang-orang yang berbeda agama atau paham dengan kita, kita harus memperhatikan dua hal. *Pertama*, kita bisa mendakwahi mereka dengan cara di atas tadi. Kalau orang tersebut masih tidak menerima, biarkan saja, tidak perlu dengan pemaksaan. *Kedua*, mereka yang berbeda paham dengan kita, mereka belum tentu sesat. Kalau kita memandang tiga prinsip yang harus dipegang untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah, yaitu iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh, maka mereka jemaat Ahmadiyah, Usman Roy, dan Lia Eden, misalnya, tidak sesat. Mereka juga tidak bisa divonis telah menodai agama atau akidah Islam. Jadi, mereka mempunyai dasar dan argumentasi masing-masing atas apa yang mereka yakini dan lakukan.

---

Hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat.

---

*Menurut Anda, apakah agama secara teologis mendukung ide kebebasan? Lalu, mengapa Pak Maruf Amin berpendapat bahwa kebebasan itu ada hanya ketika orang belum memilih agama. Jika seseorang sudah memeluk Islam, maka ia tidak bebas dan dipaksa dengan segenap aturan-aturan di dalamnya.*

Begitulah pandangan orang Muslim yang tidak mengerti makna kebebasan dalam pandangan Islam. Sebab, mustahil memaksa semua orang harus semazhab dengan kita. Tidak mungkin pula menafsirkan agama secara seragam tanpa perbedaan. Itulah salahnya sebagian orang Muslim dulu dan juga sekarang. Banyak manusia yang memposisikan dirinya seperti Tuhan. Mereka sudah menghakimi paham orang lain dan memaksa orang lain untuk sepaham dan semazhab dengan mereka. Padahal jika menyangkut urusan teologis dan kepercayaan, kita hanya bisa memberikan

pertimbangan spekulatif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti sekarang di dunia ini. Siapa yang benar dan siapa yang sesat hanya diketahui secara pasti oleh Allah. Siapa yang selamat dan tidak selamat, masuk surga dan neraka di akhirat kelak, hanya diketahui oleh Allah. Sekali lagi, al-Quran memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihannya dengan konsekuensi berani menanggung risiko yang akan dihadapinya nanti di akhirat atas pilihan bebas itu.

*Bagaimana pandangan Anda tentang upaya formalisasi atau legalisasi hukum Islam, lalu di mana posisi minoritas jika nilai-nilai agama tertentu diterapkan sebagai hukum positif?*

Terkait dengan penerapan syariat Islam, pertama kali perlu saya tegaskan bahwa penolakan terhadap perda syariah tidak mesti berarti penolakan terhadap syariah. Penolakan itu adalah penolakan terhadap formalisasi syariah, bukan penolakan terhadap syariah itu sendiri. Tanpa formalisasi syariah atau tanpa pembentukan negara Islam, syariah sudah semestinya dijalankan oleh setiap orang Muslim. Untuk menjalankan syariah, kita tidak perlu menunggu formalisasi syariah atau negara Islam.

Pada prinsipnya yang lebih penting adalah aturan yang dapat menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk menganut dan melaksanakan agama atau kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dengan pengertian lain, titik-tengoknya bukan pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau tidak, begitu pula kontroversi perda syariat Islam. Persoalannya adalah apakah setiap individu diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan paham atau mazhab yang diyakininya. Contohnya jilbab. Ada yang berpendapat memakai jilbab itu wajib. Jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika tidak demikian, berarti tidak islami. Itu salah satu paham. Di sisi lain, terdapat juga paham yang memaknai jilbab secara berbeda. Misalnya, ada yang berpaham bahwa esensi jilbab adalah fungsinya untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Banyak orang tidak memakai jilbab tetapi berpakaian cukup sopan, seperti presenter TV. Dengan berpakaian seperti itu mereka bisa menjaga diri. Untuk itu, siapapun, termasuk juga pemerintah tidak bisa memaksa orang yang menganut paham yang kedua agar sepaham dengan yang

pertama, yang dianggap islami. Contoh lainnya, nikah beda agama. Ada mazhab fikih yang mengatakan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Tetapi juga ada mazhab yang mengatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan. Maka, semua mazhab yang berbeda tersebut tetap harus diberi tempat. Begitu pula hukum potong tangan bagi pencuri. Sangat mungkin ada yang memiliki tafsir lain. Misalnya, potong tangan lebih dimengerti sebagai memotong (menghilangkan) kekuasaan, oleh karena itu cukup dengan kurungan penjara. Tafsir lain ini juga harus diberi tempat. Dengan demikian, yang harus ditekankan adalah jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang diyakininya.

Sudah barang tentu minoritas juga sangat mungkin bisa terdapat dalam satu agama. Mereka mempunyai paham yang berbeda dari mayoritas, atau teologi *mainstream*. Karena itu, di mata umat yang mayoritas, mereka dianggap aneh, ganjil dan sesat. Sebaliknya bagi mereka sendiri, apa yang mereka anut tidaklah demikian. Ini yang harus dibela supaya iman dijalankan secara tulus. Tidak terjadi kepura-puraan dan keterpaksaan.

Jadi, lagi-lagi, persoalannya bukan pada apakah paham mayoritas itu dijadikan hukum positif atau tidak. Hanya saja, pada galibnya, problem yang kemudian menyeruak adalah ketika paham tersebut ditetapkan sebagai hukum positif, maka kebebasan tercabut. Bagi saya, itulah persoalan yang melingkupi perda-perda syariah, yang dalam praktiknya malah merampas kebebasan beragama itu sendiri. Ini mungkin landasan kenapa orang ramai-ramai menentang formalisasi hukum agama.

*Apakah untuk mencapai terpenuhinya hak dan kebebasan warga diperlukan undang-undang yang dapat menjamin mereka?*

---

Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhamad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pengurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi.

---

Saya setuju kalau ada perda yang menjamin kebebasan (beragama dan berkeyakinan). Namun, bukan berarti saya setuju dengan aliran kebatinan. Jangan disalahpahami. Saya tidak setuju dengan aliran kebatinan, tetapi saya juga tidak bisa memaksa penganut aliran kebatinan meninggalkan alirannya supaya menganut apa yang saya anut. Apa yang dilakukan Dawam Rahardjo bukan membela kebenaran ajaran Ahmadiyah, tetapi lebih membela hak dan kebebasan beragama yang juga menjadi ketentuan al-Quran. Saya bukan membela Ahmadiyah atau Lia Eden, tetapi membela kebebasan menurut al-Quran versi saya, yang kebetulan saja menguntungkan pihak Ahmadiyah dan komunitas Eden. Iman memerlukan ketulusan. Tanpa kebebasan tidak ada iman yang tulus. Masalahnya, seringkali peraturan dibuat oleh kalangan mayoritas sehingga merugikan kalangan minoritas, dalam arti merampas kebebasan mereka. Padahal, merampas kebebasan beragama sangat bertentangan dengan ajaran al-Quran yang justru menjamainya.

*Bagaimana kalau alasan dibuatnya aturan seperti perda syariah justru untuk menjaga moral umat?*

Itu harus kita kembalikan pada prinsip kebebasan. Dengan diterapkannya perda syariah, apakah kebebasan tetap terjamin tanpa mengganggu kebebasan orang lain yang tidak setuju dengan aturan-aturan yang terdapat dalam perda tersebut? Memang, *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* harus dijalankan di manapun oleh umat Islam. Tapi tidak perlu syariat Islam diformalkan. Karena itu, harus ditegaskan di sini bahwa ketika seseorang tidak setuju syariah diformalkan tidak berarti dia anti-syariah. Pemahaman tentang syariah berbeda-beda. Dalam Islam kita menemukan beberapa mazhab fikih yang berbeda. Setiap penganut mazhab fikih hendaknya menjalankan syariah sesuai dengan fikih (pemahaman) masing-masing mazhab yang dianutnya.

Semua agama mempunyai syariah. Setiap orang yang beragama menjalankan syariahnya masing-masing. Apa yang dijalankan oleh seorang penganut agama tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agamanya. Itulah syariah yang dijalankannya.

*Bukankah syariah itu sendiri pada dirinya memaksa?*

Jika saya harus melakukan sesuatu menurut hati saya, berarti hati saya memaksa diri saya. Mungkin itu benar. Tetapi, pemaksaan di sini bukan dalam arti seperti itu. Yang dimaksud dengan pemaksaan: apabila ada kekuasaan atau kekuatan di luar yang memaksa seseorang atau satu komunitas untuk menjalankan ajaran yang ditentukan pihak luar. Dengan kata lain, ada unsur eksternal yang memaksa. Misalnya (negara) memaksa setiap warga negara menjalankan apa yang telah ditetapkan secara formal.

Sebaliknya, kalau saya menjalankan sesuatu menurut apa yang saya anut, ini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang saya anut memaksa saya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan memaksa adalah bahwa membuat kita harus terikat pada apa yang kita yakini, itu memang memaksa, tetapi tidak disebut memaksa dalam pengertian adanya keterlibatan pihak luar. Kata *'aqidah* berarti ikatan; yang mengikat kita. Itu adalah masalah teologis, ilmu kalam. Meskipun begitu, Ibn Arabi mengkritik bahwa Tuhan di dalam akidah bukanlah Tuhan (dalam arti sesungguhnya). Tuhan dalam akidah adalah Tuhan dalam persepsi manusia, Tuhan buatan manusia.

---

Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis. Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk menguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi, semacam egoisme teologis, yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita, dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

---

*Bagaimana jika iman mengharuskan untuk memaksa orang lain, bahkan sering dengan kekerasan?*

Jamaknya, masalah seperti ini sangat terkait dengan kekuasaan. Jadi, seseorang akan berani memaksa orang lain, meskipun pemaksaan ini tidak benar, ketika posisi dia lebih tinggi. Seandainya yang mayoritas adalah jemaat Ahmadiyah, kemudian mereka melarang orang Sunni menjalankan keyakinannya, saya akan memprotes juga. Saya akan membela Sunni, lebih tepatnya membela kebebasan menjalankan keyakinannya. Jadi, adalah sesuatu yang manusiawi: karena ada kekuasaan di tangan sekelompok

orang, atau paling tidak dia tidak terhalangi oleh kekuasaan, maka sering terjadi pemaksaan. Secara tidak sadar orang yang dalam posisi memperoleh kekuasaan pasti selalu merasa tidak pernah memaksa. Padahal secara tidak langsung ia telah memaksa. Memang, terdapat banyak sanggahan dari mereka atau pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain, bahwa persoalan ini bukan berkaitan dengan kebebasan beragama, melainkan lebih menjadi persoalan akidah – yang menurut mereka sedang terancam dan mengalami penodaan.

Kendati demikian, harus diingat bahwa akidah adalah ciptaan manusia. Dalam Islam, karena terdapat perselisihan paham atau penafsiran terhadap persoalan agama, banyak muncul akidah, di antaranya *Ahl al-Sunnah*, Syi'ah, Ahmadiyah, dan sebagainya. *Ahl al-Sunnah* juga bermacam-macam, ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Demikianpun Syi'ah tidak hanya satu paham, juga Ahmadiyah dan seterusnya.

Sejatinya, Tuhan tidak bisa diikat oleh akidah. Tuhan di luar akidah. Kalau Tuhan diikat berarti Tuhan terbatas. Padahal Tuhan tidak dapat dibatasi. Maka dari itu jangan menuhankan akidah, tuhanlah Tuhan. Orang seringkali tidak menyadari bahwa dia lebih setia pada akidahnya, alirannya, sektenya ketimbang kepada Tuhan. Mereka juga tidak menyadari bahwa Tuhan melarang kita membunuh orang lain. Tetapi, seringkali atas nama akidah ataupun Tuhan, tidak jarang orang rela membunuh. Ini bertentangan dengan larangan membunuh. Ini sangat bertentangan dengan prinsip bahwa Tuhan memberikan kebebasan dalam beragama. Ini bertentangan dengan kemauan Tuhan.

*Apakah menurut Anda kebebasan beragama berkorelasi atau menunjang kemajuan sebuah bangsa?*

Kebebasan beragama dan kemajuan jelas mempunyai korelasi, tetapi hal tersebut jangan dikaitkan atau diukur dengan materi. Sebab dalam kemajuan sebuah bangsa terdapat aspek intelektual dan spiritual. Karena itu, semangat kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang menunjang kemajuan bangsa harus terus diperjuangkan. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan harus dijamin. Kebebasan beragama juga harus dijamin. Jika tidak, saya kira

bukan hanya Ahmadiyah saja yang akan dibungkam, begitupun kelompok-kelompok liberal juga akan dibungkam, termasuk tafsir-tafsir yang dianggap aneh. Padahal, tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman itu mungkin dianggap aneh bagi kelompok tertentu, tetapi tidak aneh bagi pendukungnya. Karena mereka benar-benar tidak paham atas tafsir-tafsir tersebut, kemudian mereka menganggapnya aneh. Lantas, setiap yang mereka anggap aneh harus dibungkam. Jadi pada saatnya nanti bukan hanya Ahmadiyah, mungkin juga Paramadina, Jaringan Islam Liberal, kaum minoritas lain, dan paham-paham baru lain akan menjadi sasaran mereka.

*Alasan mereka membungkam bukan hanya karena ketakutan teologis, tetapi juga politis. Sebab mereka membayangkan kalau seragam niscaya nantinya menjadi lebih mudah teratur, tertib dan akan mudah mencapai peradaban yang diidamkan.*

Itu yang keliru. Justru keragaman adalah hukum alam. Kalau kita menentang perbedaan berarti menentang hukum alam. Kita patut merenungkan kata-kata bijak yang berbunyi, “*The world would be a dull place if we all agreed on everything.*” Karenanya jangan memaksa untuk seragam. Tuhan sendiri, seandainya menghendaki, semua orang men-

jadi satu umat. Itu tentu bisa dan sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Bukankah Tuhan telah mengatakan, seperti disebut di atas, “Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin?” (al-Quran 10: 99).

---

Kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka, kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama.

---

*Belakangan ini ada isu syariat Islam dipertentangkan dengan Pancasila, sebagai upaya dari beberapa kalangan Islam yang berhasrat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bentuk aturan-aturan formal, baik*



*berupa peraturan daerah ataupun lebih ekstrem lagi negara Islam. Apa respon Anda atas upaya-upaya tersebut?*

Seharusnya syariat Islam tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Pasalnya, pengertian dan paham kita tentang syariat Islam juga berbeda-beda, sebagaimana fikih juga bermacam-macam. Sekarang ada pula tafsir baru tentang syariah. Misalnya yang dilontarkan oleh Mahmud Thaha dan Abdullahi An-Na'im. Mereka mempunyai teori evolusi syariah. Menurut mereka syariah yang selama ini dijalankan masih diskriminatif terhadap kaum perempuan dan non-Muslim. Mereka lantas menekankan bahwa syariah yang dibutuhkan adalah syariah yang universal, egalitarian, demokratis, dan tidak diskriminatif. Mereka tidak anti-syariah. Mereka hanya memberikan tafsir baru tentang syariah. Biarkan saja orang menuduh tafsir baru itu sesat, asal jangan Tuhan yang menuduhnya.

*Lalu, apakah Pancasila, sebagai dasar negara kita, dan UUD '45, sebagai landasan konstitusinya, sudah ideal?*

Ya. Menurut saya tidak ada yang menjadi masalah. Itu memang cocok untuk Indonesia. Pancasila dan UUD '45 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, bagi saya, kembali lagi pada apa yang tadi sudah saya ungkapkan di atas: persoalannya bukan formalisasi syariah lewat perda-perda atau tidak, tetapi lebih pada problem terancamnya hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau syariah menurut sebuah paham tertentu sudah dijadikan perda, maka syariah menurut paham lain yang berbeda niscaya tidak akan mendapat tempat. Akhirnya orang menjalankan agama karena keterpaksaan, bukan karena ketulusan. Agama tanpa ketulusan tidak ada artinya. Begitupun tidak ada artinya menjalankan agama dengan keterpaksaan dan kepalsuan (kepura-puraan).

*Mengapa resistensi umat Islam terhadap pluralisme demikian kuat?*

Tentu saja, di samping sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga lebih ditangkal oleh kebanyakan orang sebagai hantu. Akibatnya resistensi terhadap pluralisme bukan semakin reda, justru kian deras. Di benak

mereka hanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Sementara itu, saya lebih melihat pluralisme secara bertingkat. Pada tingkat sosiologis, selama orang menghargai kemajemukan, walaupun misalnya tidak mengakui kebenaran agama lain atau paham lain, saya kira itu sudah bagus. Pada tingkat teologis, pluralisme biasanya diartikan bahwa semua agama, meskipun berbeda dalam rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya, tetap memiliki tujuan yang sama. Yakni, bahwa semua agama, sejatinya, membawa para penganutnya kepada keselamatan. Inilah kesamaan dari setiap tujuan agama.

Pada hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Hanya saja, orang tidak berani mengatakan secara terus terang bahwa agama-agama lain (yaitu agama-agama selain Islam) tidak membawa keselamatan di akhirat. Sebagai perumpamaan, kalau orang tidak masuk Islam, kelak dia masuk neraka. MUI tentu tidak secara eksplisit mengatakan hal seperti itu. Tapi apa yang ditetapkan MUI berujung ke situ:

---

Dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah menanamkan sikap tidak toleran.

---

“Kalau tidak memeluk Islam, orang tidak akan selamat.” Namun, lagi-lagi, MUI dan kebanyakan orang tidak berani terang-terangan mengatakan pernyataan setegas itu. Itu adalah masalah eskatologis, masalah yang terkait dengan tujuan final hidup. Kebenaran masalah ini tidak bisa dibuktikan sekarang ini. Bukti kebenarannya hanya dapat dilihat di akhirat nanti. Berbeda halnya dengan hidup di dunia ini. Bagaimana hidup di dunia ini, semua orang, begitu juga orang-orang MUI, mengetahui bahwa negara-negara Barat yang demikian maju tidak pernah mengusung agama untuk dijadikan dasar negara. Tanpa agama negara-negara Barat yang sekular jauh lebih maju, makmur, kaya, dan aman.

*Apakah penolakan dan pengharaman umat Islam dan MUI terhadap pluralisme, dengan alasan paham tersebut mengidap ide-ide sinkretisme yang dapat melemahkan dan membahayakan iman umat Islam, hanya bentuk dari kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan?*

Ini terkait dengan masalah teologis. Pluralisme merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama – meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya – adalah benar. Paham ini, bagi mereka, berbahaya. Keyakinan mereka tidak bisa ditawar-tawar lagi: pokoknya, kalau ingin selamat, masuklah agama Islam. Kalau masuk agama lain, Kristen misalnya, akan masuk neraka. Itu sudah doktrin yang tidak bisa diubah lagi. Hanya saja orang tidak bilang seperti itu.

Perbedaan pandangan tentang persoalan ini tidak akan pernah hilang. Yang penting adalah bahwa kita harus toleran terhadap perbedaan. Kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan tentang masalah ini. Saya sering berkata, “Daripada kita bertengkar lebih baik kita buktikan saja siapa yang selamat dan yang tidak selamat nanti di akhirat.” Bagi saya, Islam sama dengan apa yang diajarkan oleh para penafsir pluralis, bahwa Islam dalam arti esensialnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Dalam arti dasarnya *islâm* adalah “ketundukan” (*inqiyâd*), “kepatuhan” (*tadzallul*), dan khusuk (*khusyû'*) kepada Allah. Ketika menakwilkan ayat yang berbunyi, “Sesungguhnya *dîn* (yang benar) di sisi Allah adalah *islâm*” (al-Quran 3: 19), al-Thabari, seorang penafsir klasik terkemuka, mengatakan bahwa ayat ini bermakna: “Sesungguhnya kepatuhan yang adalah satu-satunya kepatuhan di sisi-Nya adalah kepatuhan kepada-Nya, pengikraran lidah dan kalbu bagi-Nya dengan penghambaan dan kerendahan, dan ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan kepatuhan tentang apa yang disuruh dan dilarang, kerendahan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan itu tanpa menyombongkan diri kepada-Nya, tanpa berpaling dari-Nya, dan tanpa menyekutukan segala sesuatu selain Dia dengan Dia dalam kehambaan dan ketuhanan.” Jadi, sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah ‘islam’ (dengan huruf kecil). Sikap semacam itu tidak hanya terdapat dalam agama Islam. Dalam agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, seperti penganut aliran kebatinan, jika pasrah pada Tuhan, itu adalah ‘islam.’ Ini adalah ‘islam’ dalam arti esensial, bukan dalam arti sosiologis.

Saya pernah mengunjungi salah sebuah kelompok di Skotlandia dan kebetulan saya pernah tinggal bersama mereka di sana. Mereka tidak mau disebut beragama, tapi pasrah kepada Tuhan – Budhy Munawar-Rachman juga mengetahui orang-orang dari kelompok itu yang lazim disebut Beshara. Mereka sangat menekankan sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan. Mereka juga mempraktikkan zikir. Sikap pasrah dan zikir selalu ditekankan oleh orang-orang Beshara tanpa harus mengungkapkan identitas agama apa yang mereka anut. Mereka menekankan sikap “*constant awareness to Him,*” kesadaran yang konstan terhadap Dia Yang Mahamutlak. Ini adalah bentuk spiritualitas yang membuat orang dalam hidupnya sampai pada kondisi yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Kesadaran konstan kepada Tuhan adalah zikir. Dengan zikir yang terus-menerus seseorang pasrah pada Tuhan setiap saat. Orang-orang Beshara itu ketika ditanya, “*What is your religion?*,” mereka bisa tersinggung. “*We are secular,*” mereka bilang. Tetapi mereka berzikir dan pasrah kepada Tuhan. Bahasa yang digunakan untuk zikir bersama di Beshara School, Chisholme, Roberton, Hawick, Skotlandia, adalah bahasa Arab lantaran mereka mengambil unsur-unsur Islam. Di ruang-ruang studi, meditasi, kantor, dapur, dan lainnya, yang terdapat dalam bangunan-bangunan di Chisholme, ditemukan banyak kaligrafi Arab dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits.

Di Beshara School para ‘santri’ belajar kitab *Fushûsh al-Hikam*, kitab *Bhagavad Gita*, kitab *Tao Te Cing*, dan kitab *Injil Apokrifal*. Semua kitab ini mengandung ilmu esoterik yang pada intinya sama. Jika seseorang bisa memahami kitab *Fushûsh al-Hikam*, dia mudah memahami kitab *Bhagavad Gita*, *Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu juga jika seseorang bisa memahami kitab *Bhagavad Gita*, dia mudah memahami *Fushûsh al-Hikam*, *Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu seterusnya dengan dua

---

Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara sahabat mengenai *khilafah* menunjukkan bahwa al-Qur’an tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan “jabatan” kepala negara setelah Nabi saw wafat.

---

kitab lain. Beshara tidak terikat dengan agama apapun atau sistem filsafat apapun, tetapi juga tidak menolaknya. Yang lebih ditekankan adalah pendidikan esoterik. Yang lebih penting adalah esensi, bukan bentuk. Orang-orang Beshara sama sekali tidak menonjolkan agama, dalam arti sebagai institusi formal, melainkan lebih menekankan esensi agama, yaitu spiritualitas. Mereka menekankan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Mereka yang sudah menjiwai kitab-kitab semacam itu malah lebih rajin melakukan meditasi dan zikir. Tetapi kalau mereka ditanya soal agama, mereka kerap menjawab tidak menganut agama, yaitu agama dalam arti sosiologis.

Maka, kita harus senantiasa kembali kepada makna 'islam' sebagai kepasrahan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan 'islam' sebagai kualitas personal. Di sini 'islam' tidak lagi dimaknai sebagai lembaga atau sistem yang formal. Sebaliknya yang dimaksud dengan 'islam' di sini adalah 'islam' sebagai kualitas personal, atau yang disebut Wilfred Cantwell Smith sebagai "agama personal" (*personal religion*). Artinya, 'islam' bukan sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang teologi dan ritual. Pada mulanya, dalam sejarah, agama merupakan kualitas atau pengalaman spiritual. Namun, apa lacur, justru yang kemudian lebih populer seperti sekarang ini adalah agama sebagai sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang persoalan-persoalan ketuhanan dan praktik ritual.

Sejatinya, dalam arti dasarnya agama atau *dîn* adalah ketaatan, kepatuhan, dan kesalehan kepada Allah. Jadi, 'islam' sebagai agama dalam arti dasarnya bukan sistem atau lembaga, tapi kualitas personal. Dengan demikian menjadi jelas di sini bahwa apa yang dimaksud dengan 'islam' adalah kualitas personal. Kalau dipahami seperti ini, maka siapapun yang pasrah pada Tuhan dia adalah 'muslim' (dengan memakai "m" kecil). Ihwal seperti ini juga dikemukakan oleh Bawa Muhayyaddin, seorang Sufi asal Sri Langka yang pernah bermukim di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurutnya, 'islam' memiliki dua arti: (1) 'islam' dalam arti esensial, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, dan (2) 'Islam' dalam arti *congregation*, yaitu Islam dalam arti komunitas. Islam dalam arti yang kedua inilah yang ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sementara 'islam' dalam arti esensial telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Sampai kapanpun dan di mana-pun 'islam' dalam arti esensial akan terus ber-

semayam dalam batin manusia yang selalu pasrah, patuh dan sadar akan kehadiran Tuhannya.

*Doktrin resmi mayoritas menyatakan: agama-gama lain juga benar tapi diasumsikan sebelum kedatangan agama Muhammad. Setelah Muhammad datang, semua manusia harus menganut Islam. Sebab, semua agama sebelum Muhammad, termasuk Yahudi, Nasrani, apalagi agama pagan, tidak berlaku lagi. Ini adalah tafsir mainstream terhadap al-Quran.*

Kita harus membedakan antara al-Quran dan tafsirnya. Orang sering mengklaim bahwa apa yang dikatakannya adalah al-Quran. Padahal itu adalah al-Quran menurut tafsir atau pemahaman orang tersebut. Belum tentu orang lain memiliki tafsir yang sama dengan tafsirannya. Hal seperti ini yang sering terjadi. Abdulaziz Sachedina, seorang pemikir Muslim terkemuka asal Iran, mengatakan bahwa tidak ada ayat yang tegas yang menyatakan bahwa agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad terhapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang berbunyi, *“Inna al-dīna ‘inda Allāh al-islām,”* (Q. 3: 19) juga bisa dimaknai bahwa agama yang dimaksud bukanlah sistem, melainkan agama personal; sikap kepasrahan kepada Tuhan. Maka ayat ini bisa diterjemahkan sebagai, “Sesungguhnya kepatuhan – yang diterima – di sisi Allah adalah kepasrahan – kepada-Nya.”

---

Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak.

Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama.

Itu menjadi urusan warga bersama.

Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

---

*Bukankah ayat-ayat al-Quran, misalnya yang terkait dengan reaksi al-Quran terhadap Yahudi, turun sebagai respon atas sikap Yahudi hanya untuk*

*kala itu? Tetapi celakanya ayat-ayat tersebut lantas selalu menjadi rujukan umat Islam sekarang untuk membenci Yahudi atau agama lain.*

Konteks ketika ayat-ayat al-Quran turun haruslah diperhatikan. Nabi hidup dalam situasi perang dengan kelompok-kelompok non-Muslim. Tetapi harus diingat bahwa perang antara umat Islam kala itu selalu dimulai oleh gangguan orang-orang musyrik. Namun Nabi Muhammad juga pernah berteman dengan Najasi, raja Habasyah, sekarang Ethiopia. Nabi juga pernah punya Sahabat Mukhairiq, pendeta Yahudi, sampai beliau meninggal. Nabi juga pernah mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi terbaik. Bahkan Nabi pernah mengizinkan orang-orang Nasrani dari Najran melakukan kebaktian di mesjid beliau. Jadi, Nabi memberikan tauladan agar bersikap toleran terhadap para penganut agama-agama lain.

*Dalam perjalanan sejarah agama-agama belakangan ini, Barat sangat menghargai kebebasan beragama, sementara di wilayah lain, seperti negara-negara yang mayoritas Islam, penghargaan terhadap semangat kebebasan beragama kurang mendapat tempat. Apakah memang seperti itu?*

Sebelum muncul negara-bangsa, khususnya sebelum revolusi Prancis, situasi di Barat sangat parah. Konflik internal di kalangan umat Kristiani parah sekali. Kalau kita membaca sejarah gereja, ada kelompok reformasi dan antireformasi. Perang di antara mereka telah memakan korban yang sangat banyak dan berlangsung puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terbagi-baginya negara Eropa juga terkait dengan perang antara kelompok reformasi dengan kelompok antireformasi. Hingga kini, sisa pertikaian masih ada. Tetapi, mungkin lantaran mereka sudah kapok dan kelelahan oleh konflik yang amat panjang lantas berhenti dan justru membangun toleransi yang lebih kuat. Namun munculnya semangat toleransi di Barat sebetulnya bukan hanya murni karena masalah agama. Amerika, misalnya, lebih karena perang antar-warga mereka sendiri (*civil war*). Faktor pengalaman buruk akibat perang dan kelelahan menimbulkan semangat toleransi. Mereka mau belajar dari pengalaman sejarah dan tidak ingin mengulangi masa-masa gelap (peperangan) seperti sebelumnya. Kesimpulan yang hendak saya sampaikan adalah: seharusnya kita mengambil pelajaran dari sejarah orang lain.

Tetapi yang lebih menarik lagi, ketika saya membandingkan agama-agama dalam konteks sejarahnya, konflik antaragama dan internal agama justru yang paling sedikit di Timur, tempat lahir dan berkembangnya Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Sebab, Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme sangat kuat menekankan kasih sayang, kedamaian, dan keharmonian. Karena itu di kalangan para penganut setianya, suasana harmoni, kedamaian dan ketenangan terasa sangat kuat. Tradisi meditasi dan yoga sangat kuat di kalangan mereka. Kalaulpun ada konflik antaragama seperti di Thailand atau di belahan bumi bagian Timur lain lebih disebabkan faktor politis. Unsur agamanya sangat kecil. Sejauh yang saya ketahui pula, perang antarsekte dalam Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme tidak ada. Sebaliknya dalam sejarah Islam ada, seperti antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syi'i. Begitupun dalam Kristen, seperti perang antara Katolik dan Protestan.

---

Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

---

*Pandangan-pandangan Anda yang sangat toleran dan mendamaikan ini ditentang banyak orang. Lalu, bagaimana masa depan pemikiran seperti ini, apakah akan semakin diterima orang atau semakin terkikis?*

Saya tidak mengetahui persis. Tapi yang jelas saya tidak sendirian, walaupun juga tidak bisa dikatakan sebagai mayoritas. Orang-orang yang bersikap toleran seperti orang-orang Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), International Center for Islam and Plu-



ralism (ICIP), The Wahid Institute, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), sebuah aliansi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia yang memperjuangkan *religious freedom*, dan orang-orang dari organisasi-organisasi lain yang mendukung pluralisme adalah orang-orang yang memperjuangkan sikap mendukung dan menghargai kemajemukan. Jumlah mereka memang sedikit. Maka, dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah menanamkan sikap tidak toleran.

Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhammad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pengurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi. Apakah ada pengurus masjid berani mengizinkan orang Kristen melakukan kebaktian di masjid? Malah sebaliknya, alih-alih memberi fasilitas kepada orang Kristen untuk mengadakan kebaktian atau non-Muslim lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, kalau bisa gereja dan tempat ibadah lainnya diruntuhkan saja.

Dalam kaitan dengan gagasan pluralisme, lantas ‘islam’ dalam arti manakah yang seharusnya dijiwai setiap orang? Saat ini orang lebih menyukai mengartikan Islam sebagai sistem. Bagi kebanyakan umatnya, yang dimaksud Islam adalah Islam yang khusus hadir sejak zaman Nabi Muhammad atau agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu sudah terhapuslah ‘islam’ yang sebelumnya. Demikianlah kaca mata eksklusivisme. Maka hanya penganut Islam saja yang benar. Kalau tidak menganut Islam seseorang tidak akan selamat di akhirat kelak. Tetapi saya sering mengatakan, “Apa ruginya orang-orang dari agama-agama lain kalau mereka juga selamat dan masuk surga?” Dalam suatu kesempatan diskusi di Teater Utan Kayu saya juga pernah mengatakan, “Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis.” Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk me-

nguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi semacam egoisme teologis yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

*Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pluralisme harus mengandaikan sekularisme dan liberalisme atau sebaliknya?*

Bagi saya, ini agak sulit. Saya tidak bisa mengatakan secara otomatis seperti itu. Tetapi menurut saya pluralisme lebih dekat dengan gagasan demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Karena pluralisme menghormati kemajemukan. Jika itu diabaikan, tidak mungkin demokrasi bisa berjalan. Demokrasi juga sangat terkait dengan *civil society*. *Civil society* berarti masyarakat secara bebas dan mandiri mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keinginan-keinginannya. Jadi masyarakat tidak didominasi oleh negara. Hal seperti itu sejalan pula dengan sekularisme di mana negara tidak mendominasi atau tidak didominasi oleh satu agama, dan yang secara implisit satu aliran semata. Kalau dikuasai oleh satu agama – yang berarti juga satu paham teologi atau satu mazhab agama – secara otomatis agama lain juga paham teologi lain atau mazhab lain akan terpinggirkan. Di sini tidak ada kebebasan. Padahal kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama. Dalam hal ini saya setuju dengan Abdul Karim Soroush yang membela kebebasan supaya manusia beriman dengan murni dan tulus.

---

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kelompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat.

---

Misalnya, orang memakai jilbab. Saya, dulu dan juga sekarang, sangat anti terhadap setiap kantor pemerintah atau kantor swasta yang melarang orang memakai jilbab. Sebab itu adalah keyakinan pemakainya. Karena itu pemakaian jilbab tidak boleh dilarang. Pelarangan adalah upaya pemaksaan agar tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah pemakaian jilbab. Kebebasan memakai jilbab harus dijamin. Begitupun sebaliknya, orang juga tidak boleh memaksakan supaya orang lain memakai jilbab. Contoh lainnya lagi, di suatu daerah jika tidak memakai jilbab akan ditangkap. Hal seperti ini nantinya akan menyebabkan sangat banyak kemunafikan. Akhirnya, orang memakai jilbab bukan karena Allah, tapi lantaran takut ditangkap oleh polisi. Atau, begitu juga dengan salat. Kalau orang tidak salat akan ditangkap polisi, akibatnya orang salat bukan lagi karena ketulusan. Dahulu, waktu Soeharto masih memerintah, ada tradisi melaksanakan salat *tarâwih* di kantor-kantor menterinya. Semua bawahannya ikut. Tentu saja motif ibadah mereka bukan murni karena Allah, tapi karena jabatan. Jadi, kalau beribadah, orang mestinya betul-betul tulus, bukan karena ikut-ikutan saja karena kepala kantornya atau karena khawatir dipecat dan diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Ini cara beragama yang tidak baik.

Ini bukan berarti saya menyetujui orang yang tidak salat. Atau misalnya juga saya tidak menyetujui ateisme. Namun demikian, kaum ateis jangan pula dipaksa untuk mengucapkan pernyataan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hal ini sangatlah penting supaya kalau seseorang percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu betul-betul tulus. Kita pun tidak bisa memaksa orang lain untuk sepaham dengan kita. Karena keimanan itu sendiri datangnya dari Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan berkehendak menjadikan semua orang menjadi satu umat yang beriman, tentu Tuhan bisa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu. Agama harus dijalankan secara tulus supaya tidak terjadi kemunafikan.

Meskipun saya juga tidak menyetujui pornografi, dan dalam batas-batas tertentu kita juga harus tahu sopan-santun, tetapi, bagi saya, orang tidak bisa dipaksa memakai jilbab, apalagi ditangkap karena tidak memakai jilbab. Maka akan menjadi masalah apabila negara mencampuri urusan agama – terlebih beragama dan berkeyakinan merupakan urusan yang sangat per-

sonal – seperti mengatur pakaian atau mewajibkan memakai jilbab. Akibatnya banyak orang memakai jilbab bukan karena keimanan, tapi lebih karena takut ditangkap. Artinya ke-imanan itu tidak tulus. Yang kita inginkan adalah ketulusan dalam beriman. Meskipun orang tidak memakai jilbab, kita tidak lantas membenci dia atau mengusir dia dan memperlakukannya secara diskriminatif. Ini sekadar contoh, tentu ada contoh-contoh yang lain. Dalam makalah yang dibikin untuk acara *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*, saya pernah menyinggung peraturan yang diterapkan rezim Taliban yang

sangat menindas kaum perempuan di sana, yang menetapkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di dalam buku *My Forbidden Face*, yang ditulis oleh Latifa, seorang perempuan muda korban peraturan rezim Taliban di Afghanistan, misalnya, disebutkan bahwa kaum ibu dan perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah, kaum ibu dan perempuan dilarang mengenakan pakaian berwarna terang di dalam burqa mereka, kaum perempuan juga tidak boleh naik taksi kecuali bersama muhrimnya. Termasuk di dalam bus kota, laki-laki dan perempuan harus dipisah.

Jadi, istilah-istilah liberalisme, sekularisme dan pluralisme, saya khawatir itu lebih merupakan ‘hantu’ daripada kenyataan. Itu hanya ada dalam pikiran. Apabila kita melihat di alam nyata, negara-negara Barat yang maju, seperti Britania Raya, Prancis dan Jerman yang menerapkan ketiga paham tersebut, kendatipun mungkin tidak dieksplisitkan, angka kriminalitasnya lebih kecil, korupsinya juga tidak sebesar di sini. Di Indonesia, kita setiap hari dapat membaca berita di media-media massa tentang orang saling bacok, perkelahian antar-kampung, tawuran pelajar, perampokan, dan tindak pelbagai kriminal lainnya. Semua itu terpampang nyata kalau kita membaca berita dan menyaksikan acara-acara seperti Derap Hukum dan sejenisnya di televisi. Saya kira kriminalitas di negara-negara Barat yang maju tidak sebesar di sini.

---

Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata “Islam” dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata “Islam” telah mengalami inflasi.

---

*Kalau memang kebanyakan dari umat Islam dan MUI cenderung lebih suka melihat 'hantu'nya, dan karena itu lantas mengharamkan begitu rupa, ketimbang mencoba untuk belajar secara objektif apa sesungguhnya sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan semua itu?*

Menurut saya kebanyakan mereka tidak mau memahami realitas yang sebenarnya. Cobalah jalan-jalan atau tinggal di sana (negara-negara Barat). Memang, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di sana, seperti Prancis, Jerman, Swedia, Swis, Austria, atau tempat lain seperti Jepang, tentu saja ada kekurangan, tetapi negara-negara itu lebih makmur, korupsinya lebih kecil daripada yang terjadi di negara kita. Di sini, kita sehari-hari melihat para peminta-minta atau pengemis di bus kota dan di tempat-tempat lain. Kenyataannya seperti itu.

Mungkin penolakan atau pengharaman terhadap ketiga gagasan tersebut lantaran orang tidak paham atau mungkin juga karena ketakutan-ketakutan itu. Dan karena alasan-alasan itu pula, sampai-sampai demokrasi juga diharamkan. Kita juga tidak perlu meniru Barat sepenuhnya, apalagi menjadi 'terbaratkan.'

*Atau lantaran mereka menganggap ketiga paham tersebut sebagai produk Barat. Padahal dalam kenyataannya sekularisasi di negara Islam sendiri sebetulnya sudah menjadi praktik keseharian. Mereka mengadakan pemilu dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap menggunakan jargon bahwa mereka tidak sekular.*

Mereka, negara-negara Barat, tidak latah mengukur diri mereka dengan jargon dan slogan-slogan, "Kami negara sekular," misalnya, bahkan ungkapan itu pun tidak diucapkan. Tetapi mereka lebih mempraktikkan semangatnya. Saya tambahkan juga di sini, bahwa negara lain yang lebih bagus daripada negara kita pasti akan menjadi incaran bagi para imigran. Kenyataannya penduduk Aljazair, yang mayoritas Muslim, dan juga penduduk negara-negara lain di Afrika, Turki dan negara-negara berkembang lainnya, ingin pergi ke Eropa. Artinya mereka tidak betah di negaranya sendiri. Mereka susah mencari penghidupan di negara sendiri. Ini menjadi bukti bahwa negara orang lain lebih disukai daripada negara sendiri. Dahulu

banyak pengungsi dari Vietnam dan Kamboja hijrah ke Amerika karena hidup di negara mereka sendiri sangat susah. Sama saja misalnya, sekarang, orang Papua lebih memilih pindah ke Australia karena Australia dianggap lebih bagus penghidupannya. Demikian juga Indonesia, banyak tenaga kerja kita yang pergi ke negara-negara lain. Jadi kalau di negara sendiri kurang baik, orang akan memilih pergi ke negara lain yang lebih maju. Itu tidak bisa kita bantah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006